

**PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM UPAYA
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA
PELALANGAN KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN
BONDOWOSO TAHUN 2016
(Perspektif Ekonomi Islam)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)
Jurusan Ekonomi Islam Program Studi Ekonomi syariah



Oleh:

AINUL HAKKI

NIM. 083 122 125

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

FAKULTAS EKONOMI dan BISNIS ISLAM (FEBI)

AGUSTUS 2017

**PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM UPAYA
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA
PELALANGAN KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN
BONDOWOSO TAHUN 2016
(Perspektif Ekonomi Islam)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)
Jurusan Ekonomi Islam Program Studi Ekonomi Syariah

Oleh:

AINUL HAKKI

NIM. 083 122 125

Disetujui Pembimbing

Martoyo S.H.I,MH

NIP.197812122009101001

**PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM UPAYA
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA
PELALANGAN KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN
BONDOWOSO TAHUN 2016
(Perspektif Ekonomi Islam)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam Program Studi
Ekonomi Syariah

Hari : Jum'at

Tanggal : 29 September 2017

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Ahmadiono, M.E.I
NIP: 197604012003121015
Anggota :

1. Dr. Abdul Rokhim, M.E.I
2. Martoyo S.H.I., M.H

Dr. Khairunnisa Musari, M.MT
NIP: 197810032015032001

()

()

Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Mochamad Mochotib, S.Ag MIM
NIP: 197107272002121003

MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat

kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat” (QS. An Nisa’: 58)

Jika dikaitkan dengan penelitian ini bahwa ketika seseorang sedang mengemban suatu amanat maka kerjakanlah sebagaimana amanat itu diperintahkan, seperti halnya tugas yang harus di laksanakan oleh aparat desa yakni dalam mengelola ADD bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat harus benar-benar dilakukan sesuai dengan tujuan ADD tanpa adanya kecurangan.

IAIN JEMBER

PERSEMBAHAN

“Syukur Alhamdulillah. Kini aku tersenyum dalam Iradat-Mu. Kini baru kumengerti arti kesabaran dalam penantian. Sungguh tak kusangka Ya Allah. Engkau menyimpan sejuta makna dan rahasia. Sungguh berarti hikmah yang Kau beri.”

1. Ibunda dan Ayahanda

Inilah kata-kata yang mewakili seluruh rasaku, sungguh aku tak mampu menggantikan kasihmu dengan apapun, kepadamu Ananda persembahkan salam yang harumnya melebihi kasturi. Salam suci, sesuci air telaga kautsar yang tak akan dijumpai di negeri ini. Terimalah keberhasilan berwujud gelar persembahanku sebagai bukti cinta dan tanda baktiku. Dengan Ridho Allah SWT Kupersembahkan karya kecilku ini kepada Ayahanda & Ibundaku (Abdul Azis & Wasi'ah) terimakasih atas do'a, semangat, motivasi, dan kasih sayang yang tiada putus.

2. Adikku (Nuril Fuad)

Terimakasih atas do'a, semangat, canda & tawa yang selalu menguatkan

3. Sahabat dan kawan-kawanku terimakasih atas perjuangan bersama selama ini.

4. Almamaterku Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember

IAIN JEMBER

ABSTRAK

Ainul Hakki, 2017: *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Pelalangan Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 (Perspektif Ekonomi Islam)*.

Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan lembaga dan masyarakat. Pemberdayaan lembaga dan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan pada masyarakat agar bisa merasakan kehidupan yang sejahtera. Sebagaimana tujuan dari ADD yakni pengelolaan ADD harus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan demikian kesejahteraan masyarakat harus diutamakan, dengan melalui ADD diharap dapat merubah kehidupan masyarakat. Oleh karena itu desa pelalangan sangat berhati dalam mengelola ADD mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan ndampak yang dirasakan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan bahwa, 1. Bagaimana perencanaan tata kelola ADD dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Pelalangan Kec, Wonosari Kab, Bondowoso. 2. Bagaimana pelaksanaan ADD dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Pelalangan tahun 2016. 3. Bagaimana dampak pengelolaan ADD terhadap penigkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Pelalanagn Kec, Wonosari Kab, Bondowoso. 4. Bagaimana Pengelolaan ADD di Desa Pelalangan Kec, Wonosari, Kab, Bondowoso Perspektif Ekonomi Islam.

Dan yang menjadi tujuan penelitian adalah ingin mendeskripsikan bagaimana perencanaan tata kelola ADD di Desa Pelalangan tahun 2016 dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bagaimana pelaksanaan ADD di Desa Pelalangan tahun 2016 dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bagaimana dampak ADD terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bagaimana pandangan Ekonomi Islam terhadap pengelolaan ADD dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Pelalangan..

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian fenomenologi. Lokasi penelitian Desa Pelalangan Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso. Subyek penelitian menggunakan Purposive. Adapun metode yang digunakan untuk memperoleh data, selain observasi adalah wawancara dan dokumenter. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa dalam hal perencanaan melakukan musrembang guna pemantapan agenda yang akan dilaksanakan dengan melibatkan lembaga desa dan segenap masyarakat, dan dalam pelaksanaan lebih di fokuskan pada bidang pemberdayaan dan pembangunan. Dengan menerapkan transparan, akuntabilitas serta partisipatif, masyarakat sudah merasakan dampak positif dari pengelolaan ADD yang berupa bantuan fisik, sosial dan ekonomi, pengelolaan ADD di desa Pelalangan sudah mengikuti prosedur dari pemerintah, dalam pengelaannya tidak ada unsur yang berbau riba.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucap rasa syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya. Serta sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat, dan orang-orang yang tetap setia mengikutinya hingga akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Pelalangan Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 (*Perspektif Ekonomi Islam*).

Maksud dan tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) di IAIN Jember. Dalam penyusunan skripsi ini banyak terdapat berbagai kendala, terutama dari bidang pengetahuan, karna ini merupakan kali pertama peneliti membuat skripsi, namun berkat bantuan dan bimbingan dari beberapa pihak skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E.,MM selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Moch. Chotib, S.Ag.,MM selaku Dekan Fakultas FEBI.
3. Bapak M.F. Hidayatullah, S.H.I, M.S.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam
4. Ibu Nikmatul Masruroh, M.E.I selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah.
5. Bapak Martoyo S.H.I,MH selaku dosen pembimbing skripsi.

6. Bapak Ahmadiono, M.E.I selaku wakil dekan III bidang kemahasiswaan dan ketua sidang.
7. Dr. Abdul Rohim, M.E.I selaku wakil dekan I bidang akademik dan penguji utama.
8. Dr. Khoirunnisa Musari, M.MT selaku dosen tetap dan sekretaris sidang.
9. Bapak Mufid selaku Kepala Desa Pelalangan yang telah memberikan izin penelitian dan kerjasamanya guna untuk menyelesaikan penulisan skripsi.
10. Semua pejabat Pemerintahan Desa Pelalangan yang membantu atas terselesainya skripsi ini.
11. Semua pihak yang telah memberikan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali doa kepada Allah SWT yang Maha Pemurah Lagi Maha Pengasih, semoga kebaikan yang penulis terima akan mendapatkan balasan dari-Nya. Akhirnya besar harapan penulis terhadap saran dan kritik yang bersifat konstruktif guna menyempurnakan penulisan skripsi ini dan semoga dapat bermanfaat bagi peneliti dan pembaca dalam perkembangan ekonomi.

IAIN JEMBER

Jember, Juni 2015

Penulis.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah	10
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori	20
1. Kesejahteraan Masyarakat	20
2. Perencanaan Desa	35
3. Alokasi Dana Desa (ADD).....	25

4. Landasan Ekonomi Islam	30
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian	38
B. Lokasi Penelitian	39
C. Subyek Penelitian	40
D. Teknik Pengumpulan Data	41
E. Analisis Data	44
F. Keabsahan Data	46
G. Tahap-Tahap Penelitian	47
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	49
A. Gambaran Obyek Penelitian	49
1. Sejarah Desa Pelalangan	49
2. Visi dan Misi Desa Pelalangan	51
3. Tujuan dan Sasaran Desa Pelalangan	52
4. Letak Geografis	55
5. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Pelalangan	56
6. Kondisi Sumber Daya Desa Pelalangan	59
B. Penyajian Data dan Analisis	66
1. Perencanaan Tata Kelola ADD di Desa Pelalangan	66
2. Pelaksanaan ADD di Desa Pelalangan	73
3. Dampak ADD Terhadap Masyarakat	82
4. Pandangan Ekonomi Islam	87
C. Pembahasan Temuan	92

1. Perencanaan tata kelola ADD di Desa Pelalangan	92
2. Pelaksanaan ADD di Desa Pelalangan	96
3. Dampak ADD terhadap masyarakat	100
4. Analisis Ekonomi Islam	102
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	108
A. Kesimpulan	108
B. Saran	109
DAFTAR PUSTAKA	112
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Matrik Penelitian	
Struktur Organisasi	
Proposal	
Instrumen pengumpulan data	
Jurnal Penelitian	
Foto	
Surat Keterangan	
Biodata Penulis	

IAIN JEMBER

DAFTAR TABEL

Tabel	Uraian	Halaman
4.1	Uraian Sumber Daya Alam (SDA) Desa Pelalangan Tahun 2016	60
4.2	Uraian Sumber Daya Manusia (SDM) Desa Pelalangan Tahun 2016	62
4.3	Uraian Sumber Daya Pembangunan Desa Pelalangan Tahun 2016	62
4.4	Potensi Sosial dan Kemasyarakatan Desa Pelalangan Tahun 2016	64
4.5	Pengelolaan ADD di Desa Pelalangan Tahun 2016	77



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya setiap masyarakat mempunyai gambaran tentang kondisi masa depan yang diidealkan. Dengan demikian, sebetulnya disadari atau tidak, setiap masyarakat mempunyai visi untuk mewujudkan kondisi kehidupan yang sejahtera. Masyarakat bisa dikatakan sejahtera jika kebutuhan hidupnya sudah terpenuhi baik dari kebutuhan material maupun spiritual, apabila kedua kebutuhan tersebut sudah terpenuhi maka masyarakat bisa melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik. Menurut Abraham Maslow, masyarakat akan merasakan kesejahteraan apabila kebutuhan dalam menjalani kehidupan sehari-harinya sudah terpenuhi seperti kebutuhan fisiologis, rasa aman, cinta dan memiliki, harga diri, dan aktualisasi diri.¹

Setiap masyarakat berhak untuk hidup sejahtera sebagaimana tergambar pada tujuan nasional dan tercantum konstitusi Indonesia dalam UUD 1945 Alenia IV yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut mencerdaskan kehidupan bangsa serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi untuk semua rakyat.² Karena kesejahteraan sepenuhnya harus dimiliki oleh setiap masyarakat, dalam konteks ini Islam sangat tegas menjelaskan tentang kesejahteraan, sebagaimana firman Allah dalam surat

¹ Abraham Maslow. *Teori pendekatan Hierarki dan Kebutuhan Manusia*. Jakarta PT PBP 1996. 6

² UUD 1945 alenia IV

Al-Qashash ayat 77 yang menerangkan tentang kewajiban manusia untuk memperoleh kesejahteraan.

وَأَبْتَعْ فِي مِمَّا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنَ
كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَتَّبِعِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah Telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (Q.S. Al-Qashash: 77)³

Dari ayat di atas sudah jelas bahwa Allah sudah memberi hak kepada setiap umatnya untuk hidup sejahtera, sebagaimana telah dibahas dalam sistem ekonomi Islam yaitu konsep ekonomi yang berdasarkan tauhid dan rujukan dari Al Qur'an dan Sunnah, adapun tujuan ekonomi Islam yakni: memenuhi kebutuhan manusia berupa, papan, sandang, pangan kesehatan dan pendidikan untuk setiap lapisan masyarakat, memastikan bahwa kesempatan yang telah dimiliki oleh semua orang, kemudian mencegah terjadinya pemusatan kekayaan pada masyarakat, memastikan kebebasan bagi setiap masyarakat dalam mematuhi nilai-nilai moral, dan yang terakhir memastikan stabilitas dan juga pertumbuhan ekonomi.⁴

Namun dengan demikian fakta kondisi kesejahteraan masyarakat rupanya masih sangat memprihatinkan, pada kenyataannya kehidupan masyarakat sepenuhnya belum sejahtera sehingga terjadi kesenjangan sosial.

³ Al-Qur'an, 28:77

⁴ Arif, Nur Rianto Al, Euis Amalia, *Teori Mikro Ekonomi Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group). 21

Kesenjangan sosial sangat terkait dengan struktur dan pola-pola masyarakat dalam mengelola kekayaan, mengelola pengetahuan, dan kemampuan institusi tertentu dalam masyarakat tersebut dalam mengambil keputusan, misalnya: dalam pengambilan keputusan yang lebih mementingkan kesejahteraan masyarakat.⁵

Dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah di jelaskan bahwa pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan di arahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan mengikut sertakan masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁶

Adapun maksud dari UU di atas adalah setiap daerah diberikan otonomi seluas-luasnya untuk mengurus semua penyelenggaraan pemerintah diluar kewenangan pemerintah pusat untuk membuat kebijakan daerah yang berhubungan dengan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, dengan sistem pengelolaan yang bertanggung jawab dan nyata artinya melaksanakan pengelolaan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan sesuai dengan tujuan pemberian otonomi yaitu memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

⁵ Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai upaya Pemberdayaan Masyarakat* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), 17.

⁶ UU Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004. *Tentang Pemerintahan Daerah*.

Dengan demikian, karena masyarakat Indonesia mayoritas tinggalnya di pedesaan maka desa lebih diutamakan menjadi sasaran dalam setiap program pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, dengan adanya Alokasi Dana Desa (ADD) yang menjadi dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan lembaga dan masyarakat. Pemberdayaan lembaga dan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta dari berbagai pihak demi terwujudnya kehidupan masyarakat yang sejahtera dengan memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Pasal 1 tentang Pemerintahan Desa dijelaskan bahwa perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.⁷

Dengan demikian guna tercapainya semua program peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah menggerakkan berbagai upaya dengan pemberian bantuan langsung ADD untuk masyarakat, tujuannya antara lain: Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya, meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi yang dimiliki,

⁷ UU Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016. *Tentang Perangkat Daerah*

meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa serta dalam rangka pengembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat, dan mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat.⁸

Tidak hanya itu, jika desa ingin semua agendanya bisa berjalan dengan baik maka ADD dikelola dengan prinsip demokratisasi, transparansi, akuntabilitas publik dan partisipasi masyarakat. Artinya, pemerintah daerah diberikan kewenangan secara luas, nyata, bertanggung jawab dan proporsional dalam mengatur, membagi dan memanfaatkan sumber daya nasional serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.⁹ Karena pada dasarnya ADD sangat berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di tingkat desa. Hal itu sangat dibutuhkan karena rendahnya kemandirian dari masyarakat sehingga untuk membiayai kebutuhannya sendiri masih kesulitan.¹⁰

Rendahnya partisipasi masyarakat disebabkan oleh hasil musrenbang yang tidak pernah diinformasikan kepada masyarakat. Dengan kondisi tersebut masyarakat menjadi tidak tahu besarnya ADD yang diterima desanya, tidak dapat menyalurkan aspirasinya dan tidak tahu untuk apa penggunaan dana ADD. Sehingga masyarakat menjadi sulit untuk diajak berpartisipasi dalam kegiatan ADD. Selain itu desa juga masih banyak memiliki keterbatasan-keterbatasan tertentu khususnya pada organisasi

⁸ Kompasiana. *Kelola alokasi dana desa untuk kepentingan masyarakat* 22:08. 04 Mei 2017

⁹ HAW. Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 135

¹⁰ Budi Winarno, Ph.D, *Teori Kebijakan Publik*, Pusat Antar Universitas Studi Sosial, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1989.

pemerintahannya, sehingga hal tersebut juga akan mempengaruhi dalam pengelolaan alokasi dana desa.¹¹

Sejak digulirkannya ADD di Desa Pelalangan pada tahun 2010, yang tampak dari kegiatan pengelolaan Alokasi ADD seperti pengeburan air bersih, pembenahan saluran air dan perbaikan jalan setapak. Untuk ekonominya pemerintahan desa memberi bantuan berupa timbangan dan blender bagi yang sudah membuka usaha, sedangkan bagi para janda atau lansia diberikan bantuan bahan pokok. Karena di Desa Pelalangan mayoritas petani maka perangkat desa juga membentuk kelompok tani yang setiap dusun mempunyai 5 ketua kelompok tani. Dengan demikian, Kepala Desa sangat menekankan kepada para petani khususnya ketua kelompok tani agar lebih meningkatkan kualitas pertaniannya¹²

Namun, setelah penulis melakukan observasi ternyata dalam pengelolaan ADD di Desa Pelalangan selain terdapat keunikan, juga terdapat permasalahan. Artinya, masih ada ketimpangan-ketimpangan sosial terutama dalam bidang ekonomi. Permasalahan tersebut diantaranya bantuan dalam bidang ekonomi rupanya perlu dibenahi dalam penerapannya, hal ini dikarenakan bantuan tersebut bersifat sementara dan seharusnya jangka menengah, pada bidang fisik, masyarakat hanya bisa memanfaatkan tanpa adanya sikap untuk perawatan, seperti bantuan saluran air untuk persawahan.

Mengenai hal tersebut tentunya akan memunculkan berbagai permasalahan yang sangat menarik untuk dikaji berkaitan dalam proses

¹¹ Makalah. 2012, 03, *Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa*. 21;03. 12 Januari 2017

¹² *Wawancara*, Busairi, KADES Pelalangan priode pertama. 02 Februari 2017

pengelolaan ADD. Sehingga kegiatan penelitian tentang masalah tersebut sangat penting untuk dilakukan, yaitu dengan melakukan penelitian untuk mengamati dan mencermati proses pengelolaan alokasi dana desa yang selama ini telah dilaksanakan, agar dapat mengetahui apakah dalam proses tersebut berjalan dengan baik dan implikasinya bagi masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membuat penelitian yang berjudul **“Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Pelalangan Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 (Perspektif Ekonomi Islam).”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merumuskan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan tata kelola ADD dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Pelalangan Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso?
2. Bagaimana pelaksanaan ADD dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Pelalangan tahun 2016?
3. Bagaimana dampak pengelolaan ADD terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Pelalangan Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso?
4. Bagaimana Pengelolaan ADD di Desa Pelalangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso Perspektif Ekonomi Islam?

C. Tujuan Penelitian

Agar diperoleh data yang benar-benar diperlukan dan diharapkan dalam penelitian, maka peneliti sebelumnya telah menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini.

Adapun tujuan-tujuan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan perencanaan tata kelola ADD di Desa Pelalangan tahun 2016 dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan ADD di Desa Pelalangan tahun 2016 dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Untuk mendeskripsikan dampak ADD terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4. Untuk mendeskripsikan pandangan Ekonomi Islam terhadap pengelolaan ADD dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Pelalangan.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat khususnya bagi peneliti, pembaca atau peneliti selanjutnya, bagi lembaga dan masyarakat desa Pelalangan, supaya bisa memahami bagaimana pengelolaan ADD yang sesungguhnya. Adapun manfaatnya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian tentang peningkatan kesejahteraan masyarakat ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam pengalaman sebagai bekal untuk kemudian hari dan bisa menjadi rujukan bagi upaya pengembangan

ilmu Pemerintahan, berguna untuk menjadi referensi mahasiswa yang melakukan kajian terhadap kinerja pegawai dengan permasalahan gaya kepemimpinan pada birokrasi Pemerintahan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, peneliti dapat berbagi informasi pengetahuan dan dapat menambah wawasan dalam bidang kesejahteraan masyarakat khususnya pada pengelolaan ADD.
- b. Bagi IAIN Jember, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai upaya inovasi ilmiah, dapat menambah koleksi hasanah ilmu pengetahuan yang fungsional bagi dinamika keilmuan civitas akademika dan dapat diterima sebagai kontribusi untuk meningkatkan kinerja aparat melalui peningkatan gaya kepemimpinan yang efektif . dan juga bisa dijadikan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya.
- c. Bagi lembaga, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan informasi dan sebagai salah satu motivasi dalam meningkatkan kinerja para perangkat desa guna untuk kesejahteraan masyarakat.
- d. Bagi masyarakat, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan bisa mengetahui pengelolaan ADD yang sebenarnya. Sehingga bisa memberi penilaian terhadap kinerja Pemerintahan Desa.

E. Definisi Istilah

1. Pengelolaan

Dalam (KBBI), pengelolaan diartikan sebagai proses, cara, atau perbuatan Pengelolaan.¹³

2. ADD adalah anggaran dana yang diberikan pemerintah pusat kepada desa.¹⁴

3. Upaya

Dalam (KBBI), upaya diartikan sebagai usaha/ ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud). Seperti upaya dalam memecahkan suatu permasalahan.¹⁵

4. Peningkatan

Secara umum, peningkatan merupakan upaya untuk menambah derajat, tingkat. Seperti merubah kehidupan seseorang, baik dari segi kualitas maupun kuantitas.¹⁶

5. Kesejahteraan

Sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai.¹⁷

IAIN JEMBER

¹³ Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 675

¹⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Penyusunan Alokasi Dana Desa (ADD) T.A. 2015-2016 (Bandung: Fokusindo Mandiri, 2014), 2.

¹⁵ Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1250

¹⁶ Ibid 1998

¹⁷ Ibid, 1011

6. Masyarakat

Pengertian masyarakat adalah adalah sejumlah manusia yang merupakan satu kesatuan golongan yang berhubungan tetap dan mempunyai kepentingan yang sama.

7. Analisis

Dalam (KBBI) “analisis” diartikan sebagai penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya).¹⁸

8. Perspektif

Dalam (KBBI) “perspektif” diartikan sebagai sudut pandang atau pandangan, cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang sebagaimana dapat terlihat oleh mata dengan tiga dimensi.¹⁹

9. Ekonomi Islam

Menurut Manan, Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat dalam perspektif nilai-nilai Islam.²⁰

Maksud dari judul diatas maka penelitian ini bermaksud untuk menggali tentang tata kelola ADD di Desa Pelalangan dan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat dengan tinjauan analisis ekonomi Islam.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penelitian skripsi ini terdiri atas lima bab, masing-masing bab membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab, untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas serta

¹⁸ Hasan Alwi, KBBI, 43

¹⁹ Ibid, 864

²⁰ Sholahuddin, Asas-Asas Ekonomi Islam (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 5.

mempermudah dalam pembahasan. Peneliti menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumenter, dengan menggunakan tiga metode tersebut peneliti berharap bisa mendapatkan gambaran seperti yang diinginkan tentang pengelolaan ADD di Desa Pelalangan. Secara global sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan merupakan dasar dalam penelitian, latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, serta sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Kepustakaan, membahas mengenai penelitian terdahulu, kajian teori.

BAB III Metode Penelitian berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, tahap-tahap penelitian.

BAB IV Bab Penyajian Data dan Analisis memuat hasil penelitian dan membahas tentang profil desa pelalangan, penyajian data dan analisis, dan pembahasan temuan.

BAB V Bab Kesimpulan dan Saran merupakan bab terakhir yang memaparkan tentang kesimpulan dari penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran dari penulis.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian pada bagian ini, mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik hasil penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan. Dengan melakukan langkah ini, maka dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan. Hasil penelitian terdahulu merupakan referensi bagi peneliti untuk melakukan penelitian ini, sehingga peneliti bisa mengetahui letak perbedaan dan kesamaannya

Peneliti Daru Wisakti, 2008 berjudul: **“Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Wilayah Kecamatan Geyer Kabupaten Grogogan”**²¹. Hasil temuannya bahwa di wilayah Kecamatan Geyer, yaitu Pendapatan asli desa hanya memberikan kontribusi pada pendapatan desa sebesar Rp, 452.441.900,- atau 25, 42 %. Sedangkan Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan memberikan kontribusi sebesar Rp, 945.056.000,- atau 53,22 %, maka ADD sangat menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, peningkatan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan.

²¹ Daru Wisakti, *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Wilayah Kecamatan Geyen Kabupaten Grogogan*. Program Pasca Sarjana (S2) Universitas Diponegoro Semarang 2008

Adapun rumusan masalahnya yakni 1) Bagaimana peran lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pembangunan di Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan. 2) Bagaimana penerapan ADD di Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif melalui teknik observasi, wawancara dan dokumenter.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ADD di Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan berjalan cukup lancar. Namun demikian apabila dikaitkan dengan pencapaian tujuan, pelaksanaan ADD di Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan belum optimal. Meskipun tujuan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, telah terlaksana secara optimal, namun tujuan adanya peningkatan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan belum berjalan secara optimal. Demikian juga tujuan peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat belum optimal.

Perbedaan	Persamaan
Jika dilihat dari rumusan masalahnya, peneliti sebelumnya lebih fokus pada peran lembaga dan penerepannya dalam mengelola ADD, sedangkan peneliti ini rumusan masalahnya	Letak persamaan antara peneliti sebelumnya dengan peneliti ini yaitu, pembahasannya tentang pengelolaan ADD yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan dalam

menjelaskan ADD dari awal perencanaan, pengelolaan, dampak ADD terhadap masyarakat sampai di kaji menurut pandangan Islam,	penelitiannya dijelaskan bahwa pengelolaan ADD belum optimal jika dikaitkan dengan tujuan dari ADD yang sebenarnya.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Peneliti Riska Yuliani, 2012 berjudul **“Analisis Dampak Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dan Kelembagaan Desa di Kabupaten Boyolali.”** Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi tentang ADD banyak yang tidak diimplementasikan dengan baik sesuai dengan peraturan yang ada. Sebagian besar responden lebih memilih untuk ADD dengan jumlah yang berbeda untuk setiap desa dengan mempertimbangkan beberapa faktor seperti jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, potensi yang dimiliki oleh masing-masing desa dan lain - lain. Mayoritas responden menganggap bahwa dana ADD memiliki dampak positif dan efek yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, perbaikan infrastruktur publik, peningkatan pengetahuan masyarakat, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Adapun rumusan masalahnya yakni, 1) Bagaimana dampak ADD terhadap masyarakat. 2) Apa peran lembaga desa dalam mengelola ADD. 3) Bagaimana proses pemberdayaan di kabupaten Boyolali dalam memanfaatkan ADD.

Perbedaan	Persamaan
Jika peneliti sebelumnya membahas ADD yang dikelola untuk pemberdayaan masyarakat, tapi pada penelitian ini pembahasannya upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui ADD.	Letak persamaanya antara peneliti pertama dengan peneliti ini yaitu sama-sama membahas tentang teori ADD, dan kedua peneliti juga membahas tentang pelaksanaan tata kelola ADD.

Peneliti Juliska Baura 2010, berjudul **“Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi di Desa Bukumatiti Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat).”** Pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan ADD di Desa Bukumatiti belum sesuai dengan asas pengelolaan keuangan desa salah satunya asas transparansi. Dimana dalam pemberdayaan masyarakat terhadap pemanfaatan ADD pemerintah desa tidak secara terbuka kepada masyarakat mengenai dengan penggunaan ADD untuk pemberdayaan masyarakat. Ini disebabkan pemerintah desa sebagai pengelola sekaligus sebagai pelaksana pemanfaatan ADD belum begitu paham tentang asas-asas tersebut dapat dilihat langsung melalui laporan tertulis yang informatif dan transparansi.

Adapun rumusan masalahnya yaitu, 1) Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemanfaatan ADD di Desa Bukumatiti Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat. 2) Bagaimana fungsi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 2 ayat 1

yang berdasarkan asas-asas pengelolaan keuangan desayakni, transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Perbedaan	Persamaan
<p>Peneliti sebelumnya membahas ADD dalam pemberdayaan masyarakat, dan metode pengumpulan datanya tidak menggunakan dokumenter, sedangkan penelitian ini membahas ADD dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan metode pengumpulan data dokumenter.</p>	<p>Letak persamaanya antara peneliti pertama dengan peneliti ini yaitu sama-sama membahas tentang ADD, dan persamaan juga terdapat pada fokus masalah yaitu, sama-sama membahas tentang dampak ADD terhadap masyarakat.</p>

Peneliti Muhammad Farkhan, 2008 berjudul **“Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Desa (studi di Desa Pulutan Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul).”** Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi ADD di Desa Pulutan telah sesuai dengan semangat desentralisasi keuangan. Dana ADD diserahkan sepenuhnya kepada desa untuk mengelolanya baik pada alokasi maupun peruntukannya. Pelaksanaan perencanaan dan penganggaran pembangunan di Desa Pulutan dalam rangka implementasi ADD secara umum telah dilakukan secara partisipatif, akuntabilitas dan transparan.

Adapun rumusan masalahnya yaitu, 1) Bagaimana implementasi ADD di Desa Pulutan Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul. 2) Bagaimana proses perencanaan dan penganggaran pembangunan Desa Pulutan Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul dalam rangka implementasi ADD. 3) Apa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi ADD dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan desa di Desa Pulutan. 4) Siapa saja implementing agent dan peranan mereka di dalam implementasi ADD. 5) Siapa saja penerima manfaat (policy beneficiaries) dan keterlibatannya di dalam implementasi ADD.

Perbedaan	Persamaan
<p>Penelitian sebelumnya membahas kebijakan ADD pada bidang perencanaan dan pembangunan saja, sedangkan pada penelitian ini pembahasannya lebih luas lagi yang mencakup, perencanaan, pelaksanaan dengan analisis ekonomi Islam.</p>	<p>Letak persamaanya antara peneliti pertama dengan peneliti ini yaitu sama-sama membahas tentang teori ADD, dan pada rumusann masalah sama-sama terdapat perencanaan tata kelola ADD, dengan metode deskriptif kualitatif.</p>

Peneliti Eliyati, 2012 berjudul **“Upaya PNPM Mandiri dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Kebuyutan Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang.”** Hasil dari penelitian ini kegiatan PNPM mandiri di Desa Kebuyutan diputuskan melalui musyawarah

desa. Hasil musyawarah desa memutuskan bahwa program yang dilaksanakan di Desa Kebuyutan adalah simpan pinjam perempuan (SPP). Selain itu pinjaman dana bergulir merupakan program pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang bertujuan untuk mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan atau sosial dasar.

Adapun rumusan masalahnya yaitu; 1) Bagaimana upaya PNPM mandiri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa Kebuyutan Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang. 2) Bagaimana dampak PNPM mandiri dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa Kebuyutan Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang.

Perbedaan	Persamaan
Jika peneliti sebelumnya membahas upaya peningkatan masyarakat melalui PNPM, sedangkan penelitian ini ADD sebagai media untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	Letak persamaanya antara peneliti pertama dengan peneliti ini yaitu sama-sama membahas tentang upaya peningkatan kesejahteraan, dan pada rumusan masalah sama-sama membahas dampak yang dirasakan masyarakat.

Peneliti Ayu Purnami Wulandari, 2014 berjudul **“Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pelathan Pembuatan Sapu Gelagah di Desa kajongan Kecamtan Bojongsari Kabupaten Perbalingga.”** Hasil dari penelitian ini

pemberdayaan masyarakat desa melalui pelatihan pembuatan Sapu Gelagah di Desa Kajongan sudah sesuai dengan tahap pemberdayaan. Tahapan pelaksanaan pemberdayaan yaitu perencanaan, pendampingan, evaluasi dan tindak lanjut. Perencanaan dilakukan melalui musyawarah yang meliputi identifikasi kebutuhan, latar belakang, tujuan, pembentukan struktur kepengurusan dan rekrutmen anggota warga belajar. Selanjutnya pendampingan dilakukan pada proses produksi dengan mempraktekan dan memantau cara pembuatan sapu oleh pengelola, evaluasi dilakukan dengan menargetkan hasil produksi yang akan berpengaruh terhadap penghasilan warga belajar, kemudian tindak lanjut yang dilakukan pengelola yaitu menyiapkan ketrampilan lain dan diharapkan masyarakat bisa membuka usaha mandiri.

Adapun rumusan masalahnya yaitu, 1) Bagaimana pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Desa Kajongan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui pelatihan pembuatan Sapu Gelagah, 2) Apa saja faktor-faktor pendorong dan penghambat pelatihan pembuatan pembuatan sapu Gelagah di Desa Kajongan, Kecamatan Bojongsari,

Perbedaan	Persamaan
Jika peneliti sebelumnya menggunakan 2 rumusan masalah dan membahas peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pelatihan pembuatan sapu gelagah,	Letak persamaanya antara peneliti pertama dengan peneliti ini yaitu sama-sama membahas tentang upaya peningkatan kesejahteraan. Dengan metode penelitian yang

sedangkan penelitian ini membahas upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui ADD.	sama yaitu deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumenter.
-------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Peneliti Siti Ainul Wida, 2016 berjudul **“Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa-desanya Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi.”** Hasil dari penelitian ini bahwa bahwa pada tahap perencanaan dan pelaksanaan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan pengelolaannya telah dilakukan secara akuntabel dan transparan. Untuk tahap pengawasan masih belum berjalan dengan baik karena kurangnya transparansi terhadap masyarakat. Sedangkan untuk tahap pertanggung jawaban juga belum berjalan dengan baik dikarenakan sumber daya manusia tim pelaksana dalam membuat laporan administrasi yang masih kurang, sehingga diperlukan adanya pembinaan dan pengawasan lebih dari pemerintah daerah.

Adapun rumusan masalahnya yakni, 1) Bagaimana sistem akuntabilitas perencanaan Alokasi Dana Desa di Wilayah Kecamatan Rogojampi, 2) Bagaimana sistem akuntabilitas pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Wilayah Kecamatan Rogojampi, 3) Bagaimana sistem akuntabilitas pengawasan Alokasi Dana Desa di Wilayah Kecamatan Rogojampi, 4) Bagaimana sistem akuntabilitas pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di

Wilayah Kecamatan Rogojampi, 5) Bagaimana sistem akuntabilitas Alokasi Dana Desa secara keseluruhan di Desa–Desa Kecamatan Rogojampi.

Perbedaan	Persamaan
<p>Pada penelitian sebelumnya dibahas bagaimana pengelolaan ADD mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawabannya, sedangkan pada penelitian ini membahas tentang perencanaan, pelaksanaan, dan dampak yang dirasakan oleh masyarakat.</p>	<p>Letak persamaanya antara peneliti pertama dengan peneliti ini yaitu sama-sama membahas tentang pengelolaan ADD dengan metode penelitian yang sama yakni kualitatif.</p>

Peneliti Abu Rahum, 2015 **“Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Fisik Desa Kerayan Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser.”** Hasil dari penelitian ini mengetakan bahwa Pengelolaan ADD dalam Pembangunan Fisik Desa Krayan Makmur sudah terlaksana dengan baik dan berdasarakan prosedur yang ada, dan segala proses yang ada mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, laporan dan pertanggungjawaban itu sudah melalui prosedur yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan masyarakat adapun faktor pendukung dalam hal pengelolaan ADD ini adalah masyarakat ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang ada sehingga jalannya seluruh kegiatan proses pembangunan ini dilakukan dengan baik.

Adapun rumusan masalahnya yaitu, 1) Bagaimana perencanaan pengelolaan ADD dalam pembangunan fisik Desa Kerayan Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser. 2) Bagaimana pelaksanaan pengelolaan ADD dalam pembangunan fisik Desa Kerayan Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser. 3) Bagaimana penatausahaan dan pertanggung jawaban pengelolaan ADD dalam pembangunan fisik Desa Kerayan Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser. 4) Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengelolaan ADD dalam pembangunan fisik Desa Kerayan Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser.

Perbedaan	Persamaan
<p>Pada penelitian sebelumnya membahas pengelolaan ADD untuk program pembangunan fisik dan membahas tentang teori pembangunan, sedangkan penelitian ini membahas ADD bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tidak membahas teori pembangunan.</p>	<p>Letak persamaanya antara peneliti pertama dengan peneliti ini yaitu sama-sama membahas tentang pengelolaan ADD, dan pada kajian teori sama-sama membahas tentang teori perencanaan dan pelaksanaan, dengan metode penelitian yang sama yakni kualitatif.</p>

Peneliti Okta Rosalinda, 2014 berjudul **“Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Menunjang Pembangunan Desa di Desa Segodorejo dan Desa Ploso Kerep Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang.”** Hasil dari penelitian ini mengatakan bahwa tata kelola dana ADD masih nampak

belum efektif, hal ini terlihat pada mekanisme perencanaan yang belum memperlihatkan sebagai bentuk perencanaan yang efektif karena waktu perencanaan yang sempit, kurang berjalannya fungsi lembaga desa partisipasi masyarakat rendah karena dominasi kepala desa dan adanya pos-pos anggaran dalam pemanfaatan ADD sehingga tidak ada kesesuaian dengan kebutuhan desa.

Adapun rumusan masalahnya yaitu, 1) Bagaimana pengelolaan ADD dalam menunjang pembangunan desa di Desa Segodorejo dan Desa Ploso Kerep Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang. 2) Bagaimana proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban dalam mengelola ADD dalam menunjang pembangunan desa di Desa Segodorejo dan Desa Ploso Kerep Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang. 3) Apa saja faktor-faktor yang menghambat dan menunjang proses pengelolaan ADD dalam menunjang pembangunan desa di Desa Segodorejo dan Desa Ploso Kerep Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang.

Perbedaan	Persamaan
<p>Dalam penelitian ini memaparkan pengelolaan ADD dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sedangkan peneliti sebelumnya membahas ADD dalam hal pembangunan guna menunjang kehidupan masyarakat, pada</p>	<p>Letak persamaanya antara peneliti pertama dengan peneliti ini yaitu sama-sama membahas tentang pengelolaan ADD dengan sasaran masyarakat sebagai objek dan sama-sama menggunakan observasi, wawancara dan dokumenter dalam</p>

metodenya peneliti sebelumnya menggunakan triangulasi teknik dan sumber sedangkan penelitian ini hanya menggunakan triangulasi sumber.	pengumpulan datanya.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

Peneliti Wardatul Asriyah²², 2007 berjudul **“Strategi Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Melalui Usaha Tambak Di Desa Babalan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Jawa Tengah.”** Hasil temuannya, bahwa strategi yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi adalah strategi pemeliharaan atau strategi perawatan dan strategi pemasaran atau strategi penjualan. Masyarakat diarahkan untuk mendorong suatu gerakan perubahan dari ekonomi lemah ke ekonomi yang tangguh, dari ketergantungan kepada kemandirian.

Adapun rumusan masalahnya yaitu 1) Bagaimana strategi yang digunakan masyarakat Desa Babalan dalam meningkatkan kesejahteraan melalui usaha tambak. 2) Kendala apa saja yang dihadapi masyarakat saat proses pelaksanaan usaha tambak dalam upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat di Desa Babalan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak. 3) Bagaimana pengaruh usaha tambak terhadap masyarakat Desa Babalan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak. Penelitian ini menggunakan

²² Wardatul Asriyah, *Strategi Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Melalui Usaha Tambak Di Desa Babalan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Jawa Tengah*, Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2007.

metode kualitatif dengan jenis pendekatan melalui observasi, wawancara dan dokumenter.

Dari hasil penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa strategi yang digunakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi adalah strategi pemeliharaan atau perawatan dan strategi pemasaran atau strategi penjualan, strategi pemeliharaan tambak meliputi memberi makan dan memberi pupuk kepada ikan dan udang, sedangkan yang menjadi tempat pemasaran meliputi kedung, pecangaan dan semarang. Tantangan yang dihadapi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi adalah modal yang kurang, SDM. Namun dengan hambatan tersebut masyarakat jadi semangat dalam meningkatkan kesejahteraan ekonominya.

Perbedaan	Persamaan
<p>Perbedaan dengan penelitian ini yaitu, peneliti terdahulu memaparkan bahwa dalam meningkatkan kesejahteraan bisa dilakukan dengan cara memberi kesempatan pada masyarakat untuk berwirausaha salah satunya dengan usaha tambak, hal itu itu dikira sangat efektif karena mayoritas penduduk desa Babalan tinggal di daerah pesisir. Sedangkan peneliti</p>	<p>Letak persamaanya antara peneliti pertama dengan peneliti ini yaitu sama-sama membahas tentang upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan yang menjadi sasaranya yaitu masyarakat yang tergolong menengah kebawah.</p>

ini menjelaskan tentang pengelolaan ADD yang tepat sasaran dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa Pelalangan.	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Peneliti Oktaviani Rahmawati, 2014 berjudul: **“Upaya Peningkatan Kesejahteraan Perekonomian Masyarakat Melalui Usaha Kripik Belut Di Kelurahan Sidoagung Kecamatan Godean.”**²³. Hasil temuannya bahwa upaya peningkatan kesejahteraan perekonomian masyarakat yang dilakukan oleh pedagang kripik belut melalui tiga hal yaitu pemasaran, permodalan, dan pembentukan Paguyuban Harapan Mulya. Dalam pemasaran ini pemerintah menyediakan tempat khusus untuk para pedagang kripik belut agar lebih tertata rapi tidak seperti yang sebelumnya berada di pinggir jalan depan pasar Godean.

Adapun rumusan masalahnya. 1) Bagaimana upaya yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sidoagung Godean dalam meningkatkan kesejahteraan perekonomian melalui usaha kripik belut. 2) Bagaimana hasil yang diperoleh masyarakat Sidoagung Godean dalam upaya peningkatan kesejahteraan perekonomian melalui usaha kripik belut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis pendekatan melalui observasi, wawancara dan dokumenter.

²³ Oktaviani Rahmawati, *Upaya Peningkatan Kesejahteraan Perekonomian Masyarakat Melalui Usha Kripik Belut Di Kelurahan Sidoagung Kecamatan Godean*, Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2014.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya yang dilakukan masyarakat Sidoagung untuk meningkatkan kesejahteraannya yakni dengan memanfaatkan modal dari peguyuban pedagang kripik belut juga menggunakan modal sendiri. Selain itu Bidang Perikanan Kabupaten Sleman juga ikut membantu memberikan modal dan juga ada dana hibah pemberdayaan untuk para pedagang tetapi dengan sistem simpan pinjam. Dan terbukti bahwa dengan usaha kripik belut dapat meningkatkan perekonomian masyarakat paguyuban dan dapat menyerap tenaga kerja demi kelancaran usahanya. Berikut adalah perbedaan dan persamaannya:

Perbedaan	Persamaan
<p>Perbedaan dengan penelitian ini yaitu, peneliti terdahulu memaparkan bahwa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Sidoagung, masyarakat melakukan upaya melalui kripik belut dengan cara memberi pelatihan kepada masyarakat dalam mengolahnya sehingga menjadi makanan yang disukai oleh masyarakat, kemudian masyarakat diberikan pelatihan bagaimana pemasarannya.</p>	<p>Persamaan peneliti ini dengan peneliti sebelumnya yaitu sama-sama membahas teori tentang upaya peningkatan kesejahteraan dengan melibatkan peran aktif sebagian masyarakat. Kedua peneliti juga melihat bahwa potensi yang ada di Desa sangat beragam sehingga bisa dijadikan sebagai bahan untuk merubah taraf hidup masyarakat agar lebih baik lagi dari sebelumnya.</p>

<p>Sedangkan peneliti ini memanfaatkan dana ADD sebagai media dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peneliti ini juga memaparkan bagaimana tata kelola ADD yang benar yaitu dikelola dengan cara transparan, partisipatif dan tanggung jawab.</p>	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

B. Kajian Teori

1. Tinjauan Tentang Kesejahteraan Masyarakat

a. Pengertian Kesejahteraan

Kesejahteraan sosial adalah suatu keadaan dimana tercipta tatanan atau tata kehidupan yang baik (memadai) dalam masyarakat, dan bukan sekedar kemakmuran pada kehidupan materiil tetapi juga dalam kehidupan spiritual masyarakat.²⁴ Dapat diketahui pengertian kesejahteraan masyarakat secara umum yaitu keseluruhan usaha sosial yang terorganisasi dan mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang didalamnya mencakup unsur kebijakan dan pelayanan masyarakat. Menurut Abraham Maslow masyarakat akan merasakan kesejahteraan apabila kebutuhan dalam menjalani

²⁴ Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), 44-49.

kehidupan sehari-harinya sudah terpenuhi seperti kebutuhan fisiologis, rasa aman, cinta dan memiliki, harga diri, dan aktualisasi diri.²⁵

Kesejahteraan masyarakat menunjukkan ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik yang meliputi; peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, kesehatan dan perlindungan. Peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik, dan peningkatan atensi terhadap budaya dan nilai-nilai kemanusiaan. Kemudian memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari individu dan bangsa.²⁶

Peran aktif pemerintah melalui upaya pemberantasan kemiskinan, penyediaan kebutuhan hidup yang layak bagi warga negaranya, serta penanganan isu ketidakadilan, termasuk dalam hal distribusi pendapatan. Dalam kebijakan ekonomi Pemerintah memastikan setiap warga negaranya memiliki pendapatan minimum sesuai dengan standar kelayakan, memberikan layanan sosial bagi setiap permasalahan yang dialami warga negaranya (baik dikarenakan sakit, tua, atau menganggur) serta kondisi lain seperti krisis ekonomi, dan memastikan warga negaranya mendapatkan hak-haknya tanpa memandang perbedaan status, kelas ekonomi, dan perbedaan lain.²⁷

²⁵ Abraham Maslow. *Teori pendekatan Hierarki dan Kebutuhan Manusia*. Jakarta PT PBP 1996. 6

²⁶ Todaro, *Pembangunan Ekonomi Edisi Kesembilan Jilid 1*, Erlangga, 2006, 12

²⁷ Hadi Wahono, *Teori dan Konsep Dasar Negara kesejahteraan (welfare state)*, Jakarta: PT Gramedia, 2016, 21

b. Konsep Kesejahteraan

Tingkat kepuasan dan kesejahteraan adalah dua pengertian yang saling berkaitan. Tingkat kepuasan merujuk kepada keadaan individu atau kelompok, sedangkan tingkat kesejahteraan mengacu kepada keadaan komunitas atau masyarakat luas. Dengan menyiapkan kompetensi SDM yang handal, kuat dan mampu bersaing yakni dengan membekali pendidikan yang baik untuk para generasi muda. Ada beberapa pembahasan yang menarik kesimpulan bahwa ada tiga kunci utama dalam memahami negara kesejahteraan, yaitu:²⁸

- 1) Intervensi yang dilakukan oleh negara (dalam hal ini pihak pemerintah) dalam menjamin kesejahteraan warganya.
- 2) Kesejahteraan harus dikembangkan berdasarkan kebutuhan dasar masyarakat.
- 3) Kesejahteraan adalah hak dari setiap warga negara
Seperti firman Allah SWT.

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ نَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾

Artinya: “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.” (Q.S. Al-Israa’:26)²⁹

²⁸ Isbandi Rukminto Adi, *Kesejahteraan Sosial (Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, dan Kajian Pembangunan)* Jakarta: PT, RajaGrafindo Persada, 2013, 253.

²⁹ Al-Qur’an, 17:26

Gambaran kesejahteraan suatu negara juga dijelaskan Allah SWT dalam firman-Nya Q.S. Al-Baqarah ayat 126 dan Q.S. Ibrahim ayat 34 sebagai berikut:³⁰

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ
ءَامَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ
عَذَابِ النَّارِ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٢٦﴾

Artinya: “Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa: "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman diantara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman: "Dan kepada orang yang kafirpun Aku beri kesenangan sementara, Kemudian Aku paksa ia menjalani siksa neraka dan Itulah seburuk-buruk tempat kembali". (Q.S. Al-Baqarah: 126)

وَأَتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ ۚ وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا ۗ إِنَّ
الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴿٣٤﴾

Artinya: “Dan dia Telah memberikan kepadamu (keperluanmu) dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu, sangat zalim dan sangat mengingkari (nikmat Allah).” (Q.S. Ibrahim: 34)³¹

Sejahtera yang dikemukakan dalam Al,Qur'an dapat mencakup berbagai aspek kesejahteraan sosial, pada kenyataannya dapat menyempit dan meluas sesuai dengan kondisi pribadi, masyarakat serta perkembangan zaman, untuk yang masa kini

³⁰ Ibid, 2:216

³¹ Ibid., 14:34.

dijelaskan bahwa yang sejahtera adalah yang terhindar dari rasa takut terhadap penindasan, kelaparan, dahaga, penyakit dan kebodohan.³²

Sebagai contoh ukuran kesejahteraan normatif yang digagas Negara dapat dikemukakan Indeks Kesejahteraan Rakyat (IKraR) yang dikembangkan Kementerian Kesra. Konsep IKraR mengandung tiga komponen yaitu keadilan sosial, keadilan ekonomi, dan demokrasi.³³ Kesejahteraan negara tanpa harus menghilangkan perbedaan dalam ekonomi masyarakat, tetapi seharusnya memperkecil kesenjangan ekonomi masyarakat dan semaksimal mungkin menghilangkan kemiskinan dalam masyarakat.

Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia menerangkan bahwa guna melihat tingkat kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah ada beberapa indikator yang dapat dijadikan ukuran, antara lain:³⁴ Tingkat pendapatan keluarga. Komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran untuk pangan dengan non pangan. Tingkat pendidikan keluarga. Tingkat kesehatan keluarga, dan kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga.

Dalam memahami realitas tingkat kesejahteraan, pada dasarnya terdapat beberapa indikator tingkat kesejahteraan umum diantaranya: Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin,

³² M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung, Mizan, 1996. 127-128

³³ Soetomo, *Kesejahteraan Dan Upaya Mewujudkannya Dalam Perspektif Masyarakat Lokal* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 48.

³⁴ Heri Risal Bungkaes, J. H. Posumah, Burhanuddin Kiyai, "Hubungan Efektivitas Pengelolaan Program Raskin Dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Mamahan Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud", *Acta Diurna*, April 2013, 6-7

bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, dan setiap orang berhak atas jaminan social yang memungkinkan mengembangkan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat³⁵

2. Tinjauan Tentang Perencanaan Desa

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai suatu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten atau kota. Perencanaan pembangunan desa disusun secara partisipatif, yaitu melibatkan semua unsur dari masyarakat desa yang terdiri atas ketua RT/RW, tokoh masyarakat, pemangku adat, ketua organisasi kemasyarakatan, ketua organisasi perempuan, LSM, dan lain lain.

Perencanaan pembangunan desa terdiri atas:

a. Rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa)

RPJMDesa adalah suatu dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, dan program perangkat desa, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja.

³⁵ Hadi wahono, *Demokrasi dan keadilan sosial (Pemerintah untuk rakyat)*, 23:12 , 7 Mei 2017

b. Rencana kerja pembangunan desa (RKPDesa)

RKPDesa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, merupakan penjabaran RPJMDesa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja desa dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RKPDesa, RPJMDesa ditetapkan dalam keputusan kepala desa dengan berpedoman pada peraturan daerah.

Penyusunan perencanaan pembangunan desa harus berdasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Data yang diperlukan dalam penyusunan perencanaan pembangunan mencakup:

- a. Penyelenggaraan pemerintah desa;
- b. Organisasi dan tata laksana pemerintah desa;
- c. Keuangan desa;
- d. Profil desa;
- e. Informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintah desa dan pemberdayaan masyarakat.

Perencanaan desa disusun oleh kepala desa dan perangkatnya. Kepala desa bertanggung jawab dalam menyusun RKPDesa dan RPJMDesa.

Setelah kepala desa membuat rancangan pembangunan desa, rancangan ini dibawa dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa). Dalam forum inilah rencana pembangunan desa dimatangkan sehingga menjadi Rencana Pembangunan Desa. Adapun peserta forum Musrenbang desa terdiri atas:

- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM-Desa) membantu pemerintah desa dalam menyusun RPJM-Desa dan RKP-Desa;
- b. Tokoh masyarakat dan tokoh agama sebagai nara sumber;
- c. Rukun Warga/Rukun Tetangga, Kepala Dusun, Kepala Kampung, dan lain-lain sebagai anggota; dan
- d. Dan masyarakat sebagai anggota.

Perencanaan desa yang sudah disepakati ditetapkan dalam peraturan desa untuk RPJMDesa dan dalam peraturan kepala desa untuk RKPDesa, kepala desa melaporkan RPJMDesa dan RKPDesa kepada bupati/wali kota melalui camat. Laporan RPJMDesa dan RKPDesa disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak ditetapkan. Setelah dinyatakan resmi oleh bupati/wali kota RPJMDesa dan RKPDesa dilaksanakan oleh kepala desa.

3. Tinjauan Tentang Alokasi Dana Desa (ADD)

a. Pengertian ADD

Alokasi Dana Desa adalah anggaran yang diberikan pemerintah kepada desa, merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara pemerintahan

kabupaten dengan pemerintahan desa.³⁶ Untuk dapat merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka dalam mengelola ADD pemerintah Desa sangat ditekankan agar bisa mengelola dengan sebaik mungkin sebagaimana tujuan dari ADD, dan diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintahan desa.

Pemberian ADD merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonomi desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipatif, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Desa yang diberikan kewenangan untuk mengelola ADD semaksimal mungkin, Guna mencapai pengelolaan yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.³⁷

Kewenangan desa yang dilimpahkan merupakan tanggung jawab yang harus dijalankan sesuai aturan dari pemerintah. Dengan demikian, desa memerlukan pembiayaan untuk segala kegiatan yang akan dijalankan, maka dengan melalui ADD desa diharapkan bisa memanfaatkan untuk merubah pola kehidupan masyarakat.³⁸

IAIN JEMBER

³⁶ HAW. Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 147

³⁷ Hanif Nurcholis, *Otonomi Desa Dalam Pemberdayaan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), 89

³⁸ Arif, *Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa dan Pengelolaan kekayaan Desa*, Pekanbaru, ReD Post Press, 2007, 23

b. Sistem Pelaksanaan ADD

Berdasarkan sumber yang diperoleh secara garis besar terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan ADD yaitu;³⁹

- 1) Terdapat delapan tujuan ADD yang bila disimpulkan secara umum ADD bertujuan peningkatan aspek pembangunan baik prasarana fisik maupun non fisik dalam rangka mendorong tingkat partisipasi masyarakat untuk pemberdayaan dan perbaikan taraf hidupnya.
- 2) Asas dan prinsip pengelolaan ADD yaitu transparan, akuntabel, dan partisipatif. Hal ini berarti ADD harus dikelola dengan mengedepankan keterbukaan, dilaksanakan secara bertanggung jawab, dan juga harus melibatkan peran serta aktif segenap masyarakat setempat.
- 3) ADD merupakan yang integral (satu kesatuan/tidak terpisahkan) dari APBDes mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggung jawaban, dan pelaporannya.
- 4) Penggunaan ADD ditetapkan sebesar 30% untuk belanja apatur dan operasional desa dan sebesar 70% untuk belanja pemberdayaan masyarakat.
- 5) Meskipun pertanggung jawaban ADD inegral dengan APBDes, namun tetap diperlukan pelaporan atas kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari anggaran ADD secara berkala (bulanan) dan laporan hasil ahir prnggunaan ADD. Laporan ini terpisah dari pertanggung

³⁹ Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), 144.

jawaban APBDes, hal ini sebagai bentuk pengendalian dan monitoring serta bahan evaluasi bagi pemda.

- 6) Untuk pembinaan dan pengawasan pengelolaan ADD dibentuk tim fasilitasi kabupaten/kota dan tim pendamping kecamatan dengan kewajiban sesuai tingkatan dan wewenangnya. Pembiayaan untuk tim dimaksud dianggarkan dalam APBD dan diluar untuk anggaran ADD.

c. Tujuan ADD

Alokasi Dana Desa ditujukan untuk membiayai segala program yang direncanakan pemerintah desa dalam hal pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Adapun tujuan dari ADD diantaranya adalah:

- 1) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- 2) Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipasi sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh desa.

d. Sumber Pendapatan ADD

Dalam UU. No 6/2014 tentang Desa pasal 72 dan Ayat 1, pemerintah desa benar-benar diawasi oleh lembaga ditingkat atasnya dimana lembaga tersebut memiliki hubungan yang erat dengan masyarakat sehingga pemerintah desa benar-benar bertanggung jawab

kepada rakyat. Sebab jika lembaga yang mengawasi, mengendalikan dan memeriksa hanya setingkat bahkan dibawahnya maka yang akan terjadi hanya persekongkolan antara eksekutif sebagai pelaksana. Berikut sumber pendapatan desa berasal dari:⁴⁰

1. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain.
2. Dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dalam belanja transfer ke daerah/desa.
3. Dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten paling sedikit 10% dari pajak dan retribusi daerah.
4. Dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus (DAK) dan dana alokasi umum (DAU).
5. Dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Provinsi dan APBD Kabupaten.
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan lain-lain pendapatan desa yang sah.

Dana desa setiap kabupaten dialokasikan berdasarkan perkalian antara jumlah desa di setiap kabupaten, rata-rata dana desa setiap provinsi dialokasikan berdasarkan jumlah desa di setiap kabupaten, jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan tingkat kesulitan geografis. Tingkat kesulitan geografis yang dimaksud

⁴⁰ *jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1. No 6. Hal. 120-1212 /1205. 16:46, 5 Maret 2017

ditentukan oleh 4 faktor yaitu, Ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi Desa ke kabupaten.⁴¹

Pemerintah desa diberi kewenangan penuh dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) demi tercapainya tujuan negara yakni mensejahterakan warga negaranya, jika tujuan tersebut sudah terpenuhi artinya pemerintah desa sudah menjalankan tugasnya secara benar, maka masyarakatnya bisa dikatakan kesejahteraannya dapat terjamin. Dan pemerintah desa harus memenuhi beberapa prinsip pengelolaan seperti berikut:⁴²

- a) Setiap kegiatan yang pendanaannya diambil dari ADD harus melalui perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.
- b) Seluruh kegiatan dan penggunaan ADD harus dapat bertanggung jawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.
- c) ADD digunakan dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

Satu alasan rasional mengapa ada Alokasi Dana Desa (ADD) adalah kebijakan ADD sejalan dengan agenda Otonomi Daerah, dimana desa ditempatkan sebagai basis desentralisasi dan basis partisipatif, karena desa berhadapan langsung dengan masyarakat dan kontrol masyarakat sangat kuat.

⁴¹ www.beritalima.com, 23:51, 7 Mei 2017

⁴² *Napak Tilas Penyelenggaraan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Rangka Otonomi Asli Desa*. Departemen Dalam Negeri Jakarta

4. Tinjauan Tentang Ekonomi Islam

a. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ilmu pengetahuan yang menyoroti masalah perekonomian dengan mengedepankan nilai-nilai keislamannya. Ada beberapa dasar hukum yang menjadi landasan pemikiran dan penentuan konsep ekonomi dalam islam yakni. *Al-Qur'an, hadist (sunnah), ijma' dan ijtihad (qiyas)*. Meskipun ekonomi Islam menggunakan ke empat dasar hukum tersebut bukan berarti ekonomi Islam hanya ditujukan untuk umat islam saja, namun semua manusia berhak menggunakan konsep yang ada dalam sistem ekonomi berbasis ajaran islam tersebut.⁴³

Dengan demikian, maka ekonomi Islam perlu mengembangkan ilmu ekonomi yang khas, yang dilandasi oleh nilai-nilai iman dan Islam yang dihayati dan diamalkannya yaitu ilmu ekonomi Islam. Sebuah sistem ekonomi yang menjelaskan segala fenomena tentang perilaku pilihan dan pengambilan keputusan dalam setiap unit ekonomi dengan memasukkan tata aturan syariah sebagai variabel independen yang berasal dari Allah Swt, meliputi batasan-batasan dalam melakukan kegiatan ekonomi, karena antara kehidupan dunia dengan akhirat harus seimbang maka apa yang kita dapat di akhirat tergantung pada apa yang kita investasikan di dunia.⁴⁴

⁴³ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 6

⁴⁴ Adiwarmarman Karim, *Konsep Dasar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gramedia, 2003), 6

Salah satu upaya negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menciptakan bank syariah yang dalam pengoperasinya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Bank syariah merupakan bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan bunga artinya di dalamnya tidak terdapat riba namun dengan sistem bagi hasil, dan peredaran uang yang pengoperasiannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.⁴⁵ Lembaga Keuangan Syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatannya dengan berlandaskan prinsip syariah Islam. LKS terdiri dari Bank dan non Bank.

Jenis-jenis LKS yang berbentuk Bank yaitu: Bank Umum Syariah (Perbankan Syariah) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).

Sedangkan yang berbentuk non bank yaitu: *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT), Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah, Reksadana Syariah, Obligasi Syariah, Koperasi Syariah, Pasar Modal Syariah, dan Modal Ventura Syariah.⁴⁶

b. Landasan Akidah (Tauhid), Syari'ah, Akhlaq dalam Ekonomi Islam

1) Ekonomi Islam dalam Akidah (Tauhid)

Ekonomi Islam dalam akidahnya mencakup atas dua hal yaitu pemahaman tentang ekonomi Islam yang bersifat ekonomi *ilahiyyah* dan pemahaman tentang ekonomi Islam yang bersifat *rabbaniyyah*.

Segala pembahasan yang berkaitan dengan ekonomi Islam sebagai

⁴⁵ Makalah, *Sistem Ekonomi Kesejahteraan*, 9 Juli 2016, 23:54, 7 Mei 2017

⁴⁶ Yadi Janwari *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015, 12

ekonomi *ilahiyah*, berpijak pada ajaran tauhid *uluhiyyah*. Ketika seseorang mengesakan dan menyembah Allah, dikarenakan kapasitas Allah sebagai dzat yang wajib disembah dan juga tidak menyekutukan-Nya.⁴⁷ Hal ini tercantum pada Q.S. Al-An'am ayat 102 dan Q.S. Adz-Dzariat ayat 56

ذَٰلِكُمْ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ ۖ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ۖ فَٱعْبُدُوهُ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ
كُلِّ شَيْءٍ وَكِيْلٌ ﴿١٠٢﴾

Artinya: “(yang memiliki sifat-sifat yang) demikian itu ialah Allah Tuhan kamu; tidak ada Tuhan selain Dia; Pencipta segala sesuatu, Maka sembahlah Dia; dan dia adalah pemelihara segala sesuatu.” (Q.S. Al-An'am: 102)⁴⁸

وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Artinya: “Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.” (Q.S. Adz-Dzariat: 56)⁴⁹

Hal ini berimplikasi adanya niat yang tulus, bahwa segala pekerjaan yang dikerjakan oleh manusia adalah dalam rangka beribadah kepada Allah, sebagai satu bentuk penyembahan kepada-Nya. Adapun pembahasan tentang ekonomi Islam sebagai ekonomi *rabbaniyah*, berpijak pada ajaran tauhid *rububiyah*. Tauhid

⁴⁷ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, 8

⁴⁸ Al-Qur'an, 16;102

⁴⁹ Ibid., 51:56.

rububiyah adalah mengesakan Allah melalui segala hal yang telah diciptakan-Nya, dengan selalu meyakini bahwa Allah merupakan pencipta alam semesta hal ini terdapat pada Q.S. Az-Zumar ayat 62.

اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿٦٢﴾

Artinya: "Allah menciptakan segala sesuatu dan dia memelihara segala sesuatu." (Q.S. Az-Zumar: 62)

Allah juga sang pemberi Rezeki hal ini terdapat pada Q.S.

Hud ayat 6

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَىٰ اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي

كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴿٦﴾

Artinya: "Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezkinya, dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. semuanya tertulis dalam Kitab yang nyata (Lauh mahfuzh)." (Q.S. Hud: 6)⁵⁰

Dan Allah pengatur alam semesta hal ini terdapat pada

Q.S. Ali Imran ayat 26-27

قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمَلِكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمَلِكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ
مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ ۗ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۗ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٦﴾ تُولِجُ

⁵⁰ Ibid., 11:6.

أَلَيْلٍ فِي النَّهَارِ وَتُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ ۖ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَمِيتِ
أَمِيتٍ وَتُخْرِجُ مِنَ الْحَيِّ ۖ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢٧﴾

Artinya: "Katakanlah: "Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. dan Engkau beri rezki siapa yang Engkau kehendaki tanpa hisab (batas)". (Q.S. Ali Imran: 26-27)⁵¹

Ketika seseorang menyembah Allah, dikarenakan kapasitas Allah sebagai pemberi rezeki dan segala kenikmatan yang ada di dunia, jika seseorang sadar bahwa semua yang ada di dunia milik Allah yang diberikan kepada umatnya dan ketahuilah bahwa semua yang ada di dunia tidaklah abadi, maka ketika ia bersyahadat dan berikrar mengabdikan pada Allah, ia haruslah mampu memanfaatkan apa yang ada di dunia ini dengan sebaik-baiknya, sehingga bisa membawa kemaslahatan bagi masyarakat.⁵²

2) Syariah

Ketika menjalankan ekonomi Islam seseorang haruslah berjalan sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh Allah, melalui syari'at-Nya. Kaidah yang berlaku untuk segala aktivitas ekonomi yaitu: "Segala sesuatu (dalam hal muamalat) boleh

⁵¹ Ibid., 3:26-27. 22

⁵² Fauzia, Prinsip Dasar, 9

dilakukan, sampai ada dalil yang mengharamkan. Atas dasar kaidah di atas, maka segala aktivitas dalam ekonomi Islam yang membawa kemaslahatan dan tidak ada larangan di dalamnya yaitu boleh dilakukan.⁵³

Maka dari itu, keterlibatan dalam proses tata kelola keuangan akan mempengaruhi tingkat keberhasilannya, karena agama memiliki peranan dalam membentuk perilaku etis seperti kejujuran, keterbukaan, kesungguhan dan keadilan. Jika dalam pengelolaan sudah menerapkan ke empat prinsip tersebut, maka banyak kemungkinan akan memperoleh hasil yang baik seperti yang telah direncanakan, tata kelola yang baik dan benar telah dibuktikan mampu meningkatkan efisiensi dan performa subah instansi yang menerapkannya.

Dengan demikian adanya penelaahan tentang beberapa larangan-larangan dalam aktivitas ekonomi akan sangat membantu aplikasi ekonomi Islam itu sendiri. Manusia dengan sikap serakahnya bisa bertingkah semaunya tanpa memikirkan akibat atau imbas yang akan terjadi. Karena mayoritas penyebab dilarangnya suatu transaksi adalah karena adanya beberapa faktor, yang umumnya bersifat merugikan dan membawa kerusakan bagi manusia.

3) Akhlaq

⁵³ Ibid., 10

Aspek moral (akhlaq) yang selalu menjadi spirit dalam setiap aktivitas yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadits, yang berkenaan dengan perekonomian Islam adalah untuk menjunjung tinggi moral. Hal ini diawali dengan definisi harta dalam Islam, Al-Qur'an banyak menyebutkan harta dengan lafadz khairun yang berarti baik hati. Dan sudah menjadi pemahaman semua manusia bahwa segala aktivitas perekonomian selalu berkaitan dengan harta, baik yang berbentuk maupun yang tidak berbentuk.

Ketika seseorang masuk ke dalam area ekonomi Islam, maka secara tidak langsung ia telah membuat kontrak pada dirinya agar senantiasa menjunjung tinggi moral, yang merupakan tonggak perekonomian. Dan perlu diingat, bahwa profesionalitas tanpa adanya integritas yang baik akan melahirkan sistem dan praktik yang cacat dalam perekonomian. Sehingga moral ataupun akhlaq merupakan poin yang sangat penting dalam ekonomi Islam.⁵⁴

c. Prinsip ekonomi Islam

Dalam memperkuat ekonomi syariah, paling tidak ada tiga langkah strategis yang harus dilakukan secara bersama-sama. Sebagai realisasi akan menghasilkan pengembangan ilmu ekonomi Islam, pengembangan sistem ekonomi syariah dalam bentuk regulasi dan peraturan, serta ekonomi umat. Dalam sistem ekonomi syariah, berikut prinsip-prinsip ekonomi islam diantaranya:

⁵⁴ Ibid., 11-12.

- 1) Bertujuan mencapai masyarakat yang sejahtera, baik didunia maupun di akhir, terpenuhinya kebutuhan baik jasmani dan rohani, secara seimbang, baik perorangan maupun masyarakat.
- 2) Menjalankan usaha-usaha yang halal dari produk, manajemen, proses produksi hingga proses sirkulasi atau distribusi.
- 3) Hak milik relatif perorangan diakui sebagai usaha dan kerja secara halal dan digunakan untuk hal hal yang halal pula, hakikat kepemilikan adalah kemanfaatan bukan penguasaan. Pada batas tertentu, hak milik dikenakan zakat.
- 4) Dilarang menimbun harta benda dan menjadikannya terlantar.
- 5) Dalam harta benda itu terdapat hak untuk orang miskin. Karena itu harta benda harus dinafkahkan sehingga dicapai pembagian rezeki.
- 6) Perniagaan diperkenankan, dan riba dilarang.
- 7) Keadilan antar sesama manusia. Tiada perbedaan suku dan keturunan dalam bekerjasama, yang menjadi ukuran perbedaan adalah prestasi kerja.

IAIN JEMBER

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, yaitu peneliti melihat langsung apa yang benar-benar terjadi dilokasi penelitian, dan peneliti berusaha memahami arti peristiwa dan kaitanya terhadap orang-orang biasa dalam situasi tertentu. Fenomenologi merupakan pandangan berfikir yang menekankan pada fokus kepada pengalaman-pengalaman subyektif manusia dan interpretasi-interpretasi dunia.⁵⁵ Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif, permasalahan yang di angkat merupakan permasalahan yang tidak bisa dijelaskan dan dianalisa melalui data-data statistik sehingga perlu pendekatan tertentu untuk memahaminya. Penelitian kualitatif merupakan cara untuk memahami prilaku sosial sebagai upaya menjangring informasi secara mendalam dari suatu permasalahan yang ada di dalam kehidupan suatu objek, dihubungkan dengan pemecahan suatu masalah, baik dari sudut pandang teoritis maupun empiris.

Teori dalam penelitian kualitatif sebagai bekal wawasan dan memudahkan peneliti dalam membuat instrumen penelitian yang baik untuk dapat memahami konteks sosial secara lebih luas dan mendalam. Dalam kuantitatif suatu masalah harus jelas, spesifik, dan tidak berubah sampai

⁵⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif edisi revisi* (Bandung : Remaja Rosdakarya Offset, 2014), 15

proposalnya dilakukan di lapangan. Sedangkan dalam penelitian kualitatif suatu masalah itu belum jelas (bersifat sementara), tentatif, dan akan berkembang setelah peneliti terjun ke lapangan.

Begitu pula dalam batasan masalah, kuantitatif membatasi penelitian dalam satu variabel atau lebih dari satu variabel yang akan membuktikan suatu teori dalam penelitian yang dilakukan, sedangkan dalam kualitatif masih berisi pokok masalah yang masih bersifat umum dan mencari suatu teori yang baru. Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang akan menghasilkan data kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau dari proses yang diamati. Data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka diperoleh dengan cara, yaitu: observasi, wawancara, dokumen.⁵⁶

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan dimana peneliti tersebut hendak dilakukan. Dalam suatu penelitian ilmiah ini peneliti akan berhadapan dengan lokasi penelitian, dalam hal ini lokasi penelitian yang dipilih yaitu Desa Pelalangan Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso, dengan sasaran masyarakat yang masih berpotensi juga masyarakat yang sudah memiliki usaha untuk kemudian dikembangkan lagi guna merubah pola pikir masyarakat untuk lebih berkembang. Penelitian ditempat tersebut dipilih dengan pertimbangan sebagai berikut:

⁵⁶ Miles, Matthew B. 1992, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru* (Terjemahan *Qualitative Data Analysis* oleh Tjetjep Rohendi Rohidi) Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press) 15-16

1. Secara obyektif, Desa Pelalangan Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso merupakan Desa yang baru terbentuk dan masyarakatnya mayoritas menengah kebawah karena sebagian besar masyarakatnya adalah petani. Jika ditinjau dari pendidikannya masyarakat Desa Pelalangan rata-rata hanya tamatan sekolah dasar, hal itu disebabkan oleh faktor ekonomi dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pendidikan jadi masyarakat lebih memilih untuk bekerja, jadi peran ADD sangat dibutuhkan di Desa Pelalangan, dan secara lambat laun masyarakat Desa Pelalangan mulai menyadari akan pentingnya pendidikan untuk putra-putrinya. Perubahan tersebut tidak lepas peran pemerintah yang berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.
2. Secara subyektif, keberadaan Desa Pelalangan Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso terletak tidak jauh dari tempat tinggal peneliti sehingga memudahkan peneliti untuk menjangkaunya.

C. Subyek Penelitian / Penentuan Informan

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif menurut Lofland adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.⁵⁷ Subyek penelitian merupakan sumber informasi untuk mencari data dan masukan-masukan dalam mengungkap masalah penelitian atau lebih dikenal dengan istilah informan yaitu orang yang dimanfaatkan untuk

⁵⁷ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif edisi revisi* (Bandung : Remaja Rosdakarya Offset, 2014), 157

memberikan informasi tentang situasi dan kondisi dari lokasi tempat dilakukannya penelitian.⁵⁸

Yang menjadi subyek atau informan dalam penelitian ini adalah orang yang dianggap paham tentang pengelolaan ADD baik dari pelaku maupun pengguna dan berikut ini yang akan menjadi informan diantaranya, aparat Desa serta RW, RT dan lembaga-lembaga Desa, dari masyarakat yang akan menjadi informan diantaranya, pedagang atau yang sudah membuka usaha dan petani juga buru tani.

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi yaitu metode penelitian dengan cara mengamati, mencatat, dan kemudian mengolah hasil pengamatan dengan kata-kata secara cermat dan tepat.⁵⁹ Observasi merupakan salah satu teknik operasional pengumpulan data melalui proses pencatatan secara cermat dan sistematis terhadap obyek yang diamati, dengan mendatangi langsung lokasi penelitian melihat fenomena yang diamati kemudian membuat kesimpulan sehingga menjadi kata-kata yang mempunyai makna.⁶⁰

Peneliti mengadakan observasi ini secara langsung yaitu peneliti melaksanakan pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap obyek

⁵⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2007), 218.

⁵⁹ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)* Ed. 1 Cet 12 (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 106.

⁶⁰ Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), 133.

ditempat terjadinya peristiwa itu sendiri. Dengan menggunakan observasi kita dapat memperoleh gambaran tentang kehidupan sosial yang sukar diketahui dengan metode lainnya, dari hasil observasi kita akan memperoleh gambaran yang jelas tentang masalahnya dan mungkin petunjuk-petunjuk cara pemecahannya.

Adapun data yang ingin diperoleh dari observasi adalah:

- a. Cara perencanaan tata kelola ADD di Desa Pelalangan.
- b. Pelaksanaan program ADD di Desa Pelalangan.
- c. Kondisi masyarakat setelah adanya program ADD di Desa Pelalangan.
- d. Bagaimana perspektif ekonomi Islam terhadap pengelolaan ADD di Desa Pelalangan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- e. Letak geografis Desa Pelalangan.

2. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.⁶¹ Interview merupakan cara pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan tujuan penelitian.⁶²

Wawancara sebagai suatu proses komunikasi karena antara yang mewawancarai dan responden mensyaratkan adanya simbol-simbol tertentu yang dapat di mengerti kedua belah pihak, sehingga memungkinkan

⁶¹ Cholid Narbuko, Metodologi Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 83.

⁶² Marzuki, Metodologi Riset (Yogyakarta: Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta, 2005), 66

terjadinya aktivitas wawancara, agar menghasilkan data kongkrit yang relevan dengan permasalahan yang di angkat dalam penelitian. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan Bagian Kepala Desa serta beberapa jajaran perangkat desa dan masyarakat. Tujuan dari metode wawancara yaitu: 1) Untuk mendapatkan data dari tangan pertama. 2) Sebagai pelengkap teknik pengumpulan data lainnya. 3) Untuk menguji hasil pengumpulan data lainnya

Adapun data yang ingin diperoleh dari wawancara adalah:

- a. Perencanaan pengelolaan ADD di Desa Pelalangan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 - b. Pelaksanaan ADD di Desa Pelalangan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
 - c. Dampak ADD terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Pelalangan.
3. Dokumenter

Metode dokumenter adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, notulen rapat, agenda dan sebagainya.⁶³ Metode dokumenter dalam penelitian kualitatif merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Metode dokumenter yaitu pengumpulan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara intens

⁶³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), 274.

sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian.⁶⁴

Dokumenter dapat diartikan sebagai suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, biografi. Dokumen yang berbentuk gambar seperti foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Sedangkan dokumen yang berbentuk karya seperti karya seni, yang berupa gambar, patung, film dan lain-lainnya.⁶⁵

Dalam hal ini peneliti menggunakan metode dokumenter untuk mendapatkan informasi tentang:

- a. Profil Desa Pelalangan
- b. Visi, misi dan tujuan Desa Pelalangan
- c. Program kerja tahun 2016 yang dilakukan oleh pemerintahan Desa Pelalangan.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁶⁶

⁶⁴ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013, 149.

⁶⁵ Margono S. *Metodologi Penelitian Pendidikan Komponen*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007. 74

⁶⁶ Moleong, *Metode Penelitian*, 248. 47

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hal itu disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif.⁶⁷

Dalam analisis data terdiri dari 3 alur yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi Data

Yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transparansi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan atau suatu bentuk yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengkoordinasikan data dengan cara sedemikian rupa, sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

2. Penyajian Data

Merupakan langkah merancang dengan berkesinambungan terhadap deret, kolom-kolom sebuah matrik untuk data kualitatif dan memutuskan jenis dan bentuk data yang harus di masukkan dalam laporan selama memperoleh data di lapangan.

3. Penarikan Kesimpulan

Peneliti akan menganalisa semua data yang diterima atau yang dapat menjadi sebuah kesimpulan yang pada awalnya longgar, tetap terbuka, dan bisa dipahami oleh pembaca.

⁶⁷ Ibid., 11

F. Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik *triangulasi sumber* artinya membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.⁶⁸ Dengan melakukan wawancara kepada narasumber yang berbeda sampai ditemukan pandangan yang sama dari masing-masing narasumber.

Adapun teknik *triangulasi sumber* dapat dicapai dengan jalan sebagai berikut:

1. Membandingkan hasil data pengamatan dengan hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan yang di katakan secara pribadi.
3. Membandingkan dengan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang di katakannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seorang dengan berbagai pendapat dan berbagai pandangan orang antar informan.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Ada empat tahap dalam penelitian, yaitu tahap pra lapangan, pekerjaan lapangan, tahap analisis data dan tahap penulisan laporan.

1. Tahap Pra Lapangan
 - a. Memilih objek penelitian yang akan diteliti, dan hal ini peneliti memilih penelitian di Desa Pelalangan Kecamatan Wonosri Kabupaten

⁶⁸ Moleong, *Metodologi Penelitian*, 330

Bondowoso untuk mengetahui apakah pengelolaan ADD dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- b. Melakukan perizinan penelitian, baik dari pihak Desa Pelalangan Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso yang akan diteliti maupun dari pihak IAIN Jember.
 - c. Mengamati lembaga yang menjadi objek penelitian dan tujuannya adalah mengenai semua objek dan memahami segala yang ada di lembaga yang akan diteliti.
 - d. Melengkapi semua perlengkapan penelitian yang diperlukan.
2. Tahap Pekerja Lapangan

Tahap ini adalah tahap yang dilaksanakan oleh peneliti untuk observasi, mengamati, dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan penyaluran ADD yang diberikan kepada masyarakat.

3. Tahap Analisi Data

Analisis data yang dimaksud adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

4. Tahap Penulisan

Laporan setelah semua tahap-tahap penelitian dilakukan, baik pra lapangan, tahap penelitian, tahap analisis data, kemudian peneliti menulis hasil penelitian.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah Desa Pelalangan

Desa Pelalangan merupakan salah satu desa di Kecamatan Wonosari yang awalnya merupakan dusun dari Desa Bendoarum dengan kepala desa bernama Edy Supriadi. Karena adanya semangat perubahan dari semua warga Dusun Pelalangan dan pertumbuhan penduduknya juga semakin meningkat maka dusun ini pada tahun 2002 dimekarkan menjadi Desa Persiapan Pelalangan. Seiring waktu berjalan tepatnya pada tahun 2010 Desa Pelalangan menjadi Desa Definitif yang dipimpin oleh kepala Desa bernama Busairi.⁶⁹

Bapak Abdul Aziz selaku masyarakat Desa Pelalangan mengatakan.

“Desa Pelalangan itu dulunya adalah hutan yang banyak ditumbuhi rumput ilalang, ilalang tersebut juga menjadi kebutuhan masyarakat karena bisa dibuat atap atau anyaman karpet. Nah karena saking banyaknya rumput ilalang yang tumbuh disetiap lahan, akhirnya nama ilalang yang selalu jadi ingatan menjadi nama dusun pelalangan, setelah menjadi desa, nama Pelalangan sempat mau di ganti, namun upaya tersebut tidak berhasil, karena masyarakat sudah banyak sepakat dengan nama Pelalangan.”⁷⁰

Dari wawancara diatas dapat dikatakan bahwa nama Desa Pelalangan diambil dari nama ilalang yang dulu banyak tumbuh di Desa Pelalangan, nama Pelalangan meskipun sempat ingin diganti namun hal

⁶⁹ Sumber, *Profil Desa Pelalangan*, 4 Maret 2017

⁷⁰ Abd Aziz *Wawancara* 20 Juli 2017

itu tidak terjadi karena kebanyakan masyarakat sudah terbiasa dengan nama Pelalangan.

Bapak Abdullah selaku masyarakat Desa Pelalangan mengatakan

“Dulu Desa Pelalangan ini dusun dari Desa Bendoarum, nah waktu saya pernah ikut rapat di Kabupaten dan rapat itu dihadiri oleh Bupati yaitu Bapak Mas’ud, beliau mengatak kalau ada Desa yang penduduknya sudah melebihi 6000 jiwa maka Desa tersebut boleh di mekarkan, sehabisnya rapat saya langsung pulang dan sesampainya di rumah saya mengumpulkan sebagian masyarakat untuk melakukan musyawarah tentang pemekaran dusun Pelalangan, dari hasil musyawarah tersebut masyarakat sepakat dengan pendapat saya karena waktu itu dusun Pelalangan memang seperti di anak tirikan oleh Desa Bendoarum. Dengan modal nekat kami mendatangi kantor Desa untuk bertemu dengan Bapak Edy Supriadi selaku KADes Bendoarum, setelah bertemu dengan Bapak Edy kami menyampaikan hasil dari musyawarah. Dan hasilnya Bapak Edy memberi persetujuan bahwa susun pelalangan yang telah memenuhi persyaratan salah satunya masyarakat yang tinggal di dusun Pelalangan sekitar 1800 jiwa, kemudian kami di suruh ke Kecamatan untuk memberi surat persetujuan tersebut, dan akhirnya setelah lama menunggu dusun Pelalangan resmi menjadi Desa Pelalangan.”⁷¹

Berdasarkan data tersebut dapat dikatakan bahwa pemekaran tersebut dilakukan karena Dusun Pelalangan sudah memenuhi 5 persyaratan yaitu luas wilayah, jumlah penduduk, prasarana pemerintaha, potensi ekonomi, dan kondisi sosial sebagaimana yang telah di atur dalam UU Nomor 72 Tahun 2005 pasal 2 tentang perubahan status desa, pemekaran tersebut juga dilakukan karena sebagian banyak masyarakat yang tinggal di Dusun Pelalangan menganggap jika Dusun Pelalangan kurang diperhatikan.

⁷¹ Abdullah Wawancara 20 Juli 2017

Oleh karena itu masyarakat berkeinginan untuk melakukan pemekaran dusun menjadi desa, dan hal itu benar-benar dilakukan oleh masyarakat dengan melakukan musyawarah terlebih dahulu, musyawarah tersebut dihadiri oleh RT dan RW Dusun Pelalangan juga segenap masyarakat, dalam musyawarah tersebut membahas tentang keinginan masyarakat untuk merubah status dusun menjadi desa, dan masyarakat sepakat dengan hasil musyawarah tersebut, dan perjuangan masyarakat yang tinggal di dusun Pelalangan menuai keberhasilan karena dusun Pelalangan dapat dimekarkan.

Bapak Nirun selaku masyarakat Desa Pelalangan mengatakan

“Kalau bicara soal kepala Desa pertama yaitu Bapak Busairi, itu aslinya bukan pilihan dari masyarakat, yang di usulkan oleh masyarakat yaitu Bapak Samsuddin yang menjadi SekDes itu, namun karena Bapak Samsuddin waktu di usulkan merasa tidak siap, ahirnya karena tidak ada lagi yang di usulkan masyarakat untuk jadi KaDes Desa Pelalangan maka Bapak Busairi yang di usulkan oleh Bapak Edy Supriadi.”⁷²

Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa terpilihnya Bapak Busairi sebagai KaDes bukan atas keinginan dari masyarakat, karena masyarakat lebih menginginkan Bapak Sansuddin untuk menjadi KaDes Pelalangan, karena Bapak Samsuddin belum siap menjadi KaDes, maka kursi kepemimpinan diberikan kepada Bapak Busairi. Pada saat itu untuk kursi kepemimpinan memang ditentukan oleh Desa induk.

⁷² Nirun *Wawancara* 20 Juli 2017

2. Visi dan Misi Desa Pelalangan

a. Visi

Berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi Desa Pelalangan dengan melalui visi **“Terwujudnya Desa Pelalangan Yang Aman dan Makmur serta Sejahtera dalam kehidupan di segala bidang”**

Desa ingin mewujudkan ke amanan dan kemakmuran bagi masyarakat serta mengupayakan kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi sehingga masyarakat bisa merasakan kehidupan yang sejahtera.

b. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi Desa Pelalangan yang akan dilakukan dengan penjabaran sebagai berikut: Pertama, mewujudkan pemerintah desa yang tertib dan berwibawa. Kedua, mewujudkan sarana dan prasarana desa yang memadai. Ketiga, meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan sosial masyarakat. Keempat, mewujudkan ketakwaan dan kerukunan umat beragama. Meningkatkan sarana pendidikan yang bermutu. Kelima, mewujudkan desa yang berdaya dan mandiri. Keenam, mewujudkan masyarakat yang sadar akan perlunya hidup bersih dan sehat (PHBS). Ketujuh, meningkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat.

3. Tujuan dan Sasaran Desa Pelalangan

Berdasarkan Misi di atas maka ditetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut: Mewujudkan dan mengembangkan kegiatan keagamaan untuk menambah keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa

melalui kegiatan keagamaan, dan menerapkan berperilaku santun kepada masyarakat dimulai dengan pendidikan sejak usia dini. Hal ini dibuktikan dengan adanya sarana TPQ untuk anak usia dini dan antusias masyarakat sangat tinggi untuk menyekolahkan putra-purinya.

Dalam bidang pembinaan Desa Pelalangan mempunyai misi menata pemerintahan Desa Pelalangan yang kompak dan bertanggung jawab dalam mengemban amanat masyarakat, serta meningkatkan pelayanan masyarakat secara terpadu dan serius, dengan tujuan meningkatkan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan desa yang akuntabel. Terbukti dengan sistem pelayanan yang bagus dari pemerintah desa masyarakat merasakan kepuasan tersendiri dengan didukungnya setiap usulan dari masyarakat.

Selanjutnya membangun dan meningkatkan hasil pertanian dengan cara penataan pengairan, usaha tani, pemupukan, dan polatanam yang baik, bekerja sama dengan Dinas Pengairan dan Pertanian. Dalam hal ini desa sangat memperhatikan karena desa Pelalangan sebagian besar lokasinya adalah persawahan, dengan demikian guna mendapatkan hasil pertanian yang berkualitas maka yang dilakukan Desa membenahi plengsengan demi kelancaran pengairan, dan mengadakan musyawarah dengan kelompok tani dengan bekerja sama dengan dinas pertanian untuk memberi pelatihan terkait pola tanam yang lebih baik.

Dalam hal ini desa ingin mewujudkan pembangunan infrastruktur yang tepat. Pada bagian ini pemerintah desa membangun jalan setapak dengan

cara memperbaiki jalan tersebut demi kenyamanan masyarakat, seperti yang dirasakan oleh masyarakat yang ada di RT 07 yang awalnya jalan transportasinya masih lewat di halaman warga, kini dengan adanya pembangunan dari desa jalan transportasinya telah berhasil dibuat.

Kemudian dengan menumbuh kembangkan usaha kecil dan menengah, dengan memberikan bantuan peralatan, pelatihan, dan bantuan modal untuk pelaku usaha menengah kebawah, seperti pemberdayaan pedagang asongan, meningkatkan kemampuan keterampilan masyarakat melalui pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan keterampilan masyarakat seperti pengrajin bambu, penjahit, pelaku usaha rumah tangga/katring dan perbengkelan juga meningkatkan kemampuan pemasaran usaha masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi/ internet.

Setelah itu desa ingin mewujudkan kesejahteraan sosial dan kemasyarakatan. Pada bagian ini pemerintah desa sudah berhasil melakukan dua pengeboran air bersih yang mana air bersih itu memang sangat dibutuhkan oleh setiap masyarakat. Meningkatkan kesehatan masyarakat. Dengan mengikutsertakan peran petugas kesehatan desa untuk membantu mewujudkan masyarakat sehat dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh. Pada bidang kesehatan desa mengadakan penyuluhan satu minggu sekali ke setiap dusun.

Dalam bidang pendidikan desa ingin meningkatkan pendidikan dan kebudayaan, dengan sasaran. Membangun dan mendorong majunya bidang pendidikan baik formal maupun informal yang mudah diakses dan

dinikmati seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali yang mampu menghasilkan insan intelektual, inovatif dan enterpreneur (wirausahawan). Memberikan akses internet dengan membangun rumah internet sehingga memberikan kemudahan terhadap masyarakat untuk memperoleh informasi. Peran pemerintah desa pada bidang pendidikan lebih nampak pada sarana pembangunan gedung terutama pada pendidikan informal. Pemerintah desa juga meningkatkan pembinaan budaya dan olahraga. Dengan memberi lapangan sepak bola.⁷³

4. Pembagian Wilayah

a. Luas Wilayah

Luas wilayah Desa Pelalangan adalah 465,592 hektar dengan 61% adalah tanah sawah sedangkan sisanya adalah terdiri tanah tegal dan fasilitas umum. yang terletak dengan koordinat bujur 113.914573 dan koordinat lintangnya -7.915684 dengan ketinggian dari permukaan laut 370 DPL, dan perbatasan Desa Pelalangan ialah sebelah utara Desa Pasarejo, sebelah Timur Desa Bendoarum, sebelah selatan Desa Kerang Kecamatan Sukosari dan sebelah barat adalah Desa Tumpeng.

b. Jumlah Dusun

Dari total luas tersebut Desa Pelalangan dibagi menjadi 4 (Empat) Dusun, yaitu : Dusun Pelalangan Selatan, Dusun Krajan, Dusun Kauman, dan Dusun Pelalangan Utara. Dari empat dusun

⁷³ Sumber, *Profil Des*, 4 Maret 2017

tersebut masih dibagi lagi menjadi skala kecil untuk keterjangkauan dalam pelayanan kebutuhan masyarakat, maka dari empat dusun tersebut terdapat 6 (Enam) Rukun Warga (RW) dan 20 (dua puluh) RT.⁷⁴

5. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas Pemerintah desa

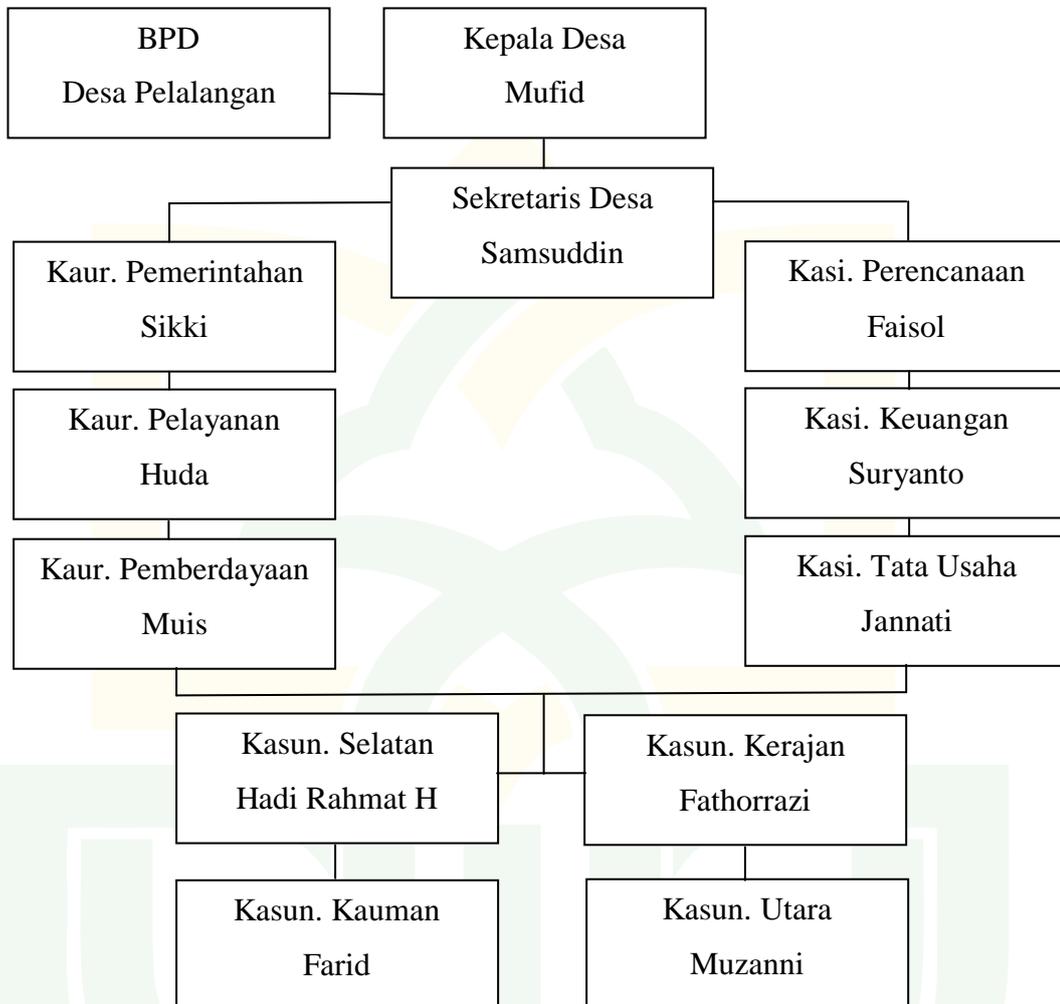
Pelalangan

a. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Susunan Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, 3 Pelaksana Teknis (KASI), 3 Bidang Urusan dan 4 Pelaksana Kewilayahan (KASUN). Semua yang mempunyai jabatan sudah memperoleh amanat masing-masing dan amanat yang sedang di embannya harus dikerjakan sebagaimana kewajibannya yakni dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian semua apa yang memang hak masyarakat maka berikan kepada masyarakat.

⁷⁴ Sumber, *Pengamatan*, 5 Maret 2017

Struktur Organisasi Pemerintah Desa Pelalangan



Sumber : *Dokumen Desa Pelalangan Kecamatan Wonosari, Tahun 2015*

Secara umum pelayanan pemerintah Desa Pelalangan kepada masyarakat cukup memuaskan. Dalam beberapa sesi wawancara langsung dengan masyarakat Desa Pelalangan yang dipilih secara acak, terungkap bahwa dalam memberikan pelayanan pengurusan administrasi kependudukan, pertanahan dan lain-lain dikerjakan dengan cepat dan dilayani selama 24 jam, baik pelayanan

pada jam kerja di kantor maupun di luar jam kerja di rumah Kepala Desa, Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lainnya.

b. Tugas Pemerintahan Desa

- 1) Tugas Kepala Desa yaitu menyelenggarakan, dan melaksanakan pembangunan desa pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- 2) Tugas Sekretaris Desa yaitu melaksanakan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, dan mengelola administrasi dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat desa dalam hal: perencanaan, evaluasi dan palaporan, keuangan, dan administrasi umum.
- 3) Tugas Bidang Urusan (KAUR) yaitu menyusun rencana kegiatan untuk bahan penyusunan program. Mengelola penyajian, pendokumentasian data dasar dan data hasil pemerintahan dan pembangunan desa. Melaksanakan monitoring/memantau, analisis, evaluasi serta pengendalian terhadap pelaksanaan program. Melakukan evaluasi pelaporan. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Desa dalam bidang tugasnya.
- 4) Tugas Bidang Teknis (KASI) yaitu melakukan peningkatan sumber daya manusia. Melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur, pengembangan ekonomi masyarakat. Kewirausahaan, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan darat, pariwisata, dan urusan pemberdayaan masyarakat

desa lainnya. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa dalam bidang tugasnya. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

- 5) Tugas Pelaksana Kewilayahan (KASUN) yaitu Memimpin penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya. Mengajukan saran dan usul dalam proses penyusunan kebijakan yang akan ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD. Menjaga kelestarian adat istiadat yang tumbuh dan berkembang di wilayah kerjanya. Menjaga keamanan, ketenteraman, dan ketertiban di wilayah kerjanya. Menumbuhkan dan mengembangkan semangat gotong-royong dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kerjanya.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

6. Kondisi dan Sumber Daya Desa

a. Sumber Daya Alam

Sumber daya alam sangat membantu terhadap pendapatan ekonomi masyarakat dan juga dapat dijadikan penunjang untuk kelancaran pembangunan desa. Akan tetapi sumber daya alam yang ada masih sangat minim, sampai saat ini sebagian besar pemanfaatan lahan digunakan untuk pertanian dan perkebunan, sehingga sangat sulit untuk memanfaatkan bahan galian atau tambang untuk infrastruktur. Adapun dari rincian sumber daya alam yang ada ialah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Jumlah Uraian Sumber Daya Alam Desa Pelalangan Tahun 2016

NO	URAIAN SUMBER DAYA ALAM	VOLUME
A	Bahan Galian/ Tambang	
	1. Batu kali dan Krikil	-
	2. Pasir Urug	-
	3. Pasir Pasang	-
B	Lahan Pemamfaatan Tanaman	
	1. Persawahan	284 Ha
	2. Perekebunan Tebu	159,5 Ha
	3. Hutan	18 Ha
C	Fasilitas Umum	40,92 Ha

Sumber : *Dokumen Desa Pelalangan Tahun 2016*

b. Sumber Daya Manusia

Desa Pelalangan yang berpenduduk 2.581 jiwa, untuk sumber penghasilannya masyarakat Pelalangan mata pencariannya mayoritas dari hasil pertanian, karena dari sebagian besar lokasi di Desa Pelalangan merupakan persawahan berdasarkan data administrasi pemerintah Desa Pelalangan akan diuraikan beberapa jenis dari sumber daya manusia di Desa Pelalangan tahun 2016 pada Tabel 4.2 berikut ini :

Tabel 4.2
Jenis Sumber Daya Manusia Desa Pelalangan Tahun 2016

No	Uraian Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah	Satuan
1	Penduduk dan keluarga		
	a. Jumlah penduduk laki-laki	1.267	Orang
	b. Jumlah penduduk perempuan	1.314	Orang
	c. Jumlah keluarga	1.056	Keluarga
2	Sumber penghasilan utama penduduk		
	a. Pertanian, perikanan, perkebunan	574	Orang
	b. Pekerja Harian Lepas Pertanian	854	Orang
	c. PNS, TNI, POLRI	8	Orang
	d. Karyawan Swasta	87	Orang
	e. Pedagang	165	Orang
	f. Pedagang	165	Orang
	g. Wirausaha	176	Orang
	h. Pensiunan	2	Orang
	i. Tukang bangunan	232	Orang
	j. Peternak	87	Orang
	k. Lain-lain/tidak tetap	396	Orang
3	Tenaga kerja berdasarkan latar belakang pendidikan		
	a. Belum Sekolah	218	Orang

b. Pernah sekolah SD tapi tidak tamat	480	Orang
c. Tamat SD / sederajat	1.138	Orang
d. Tamat SLTP / sederajat	177	Orang
e. Tamat SLTA / sederajat	133	Orang
f. Tamat D1/D2/D3	3	Orang
g. Tamat S1	23	Orang
h. Tamat S2	1	Orang
i. Tamat S3	0	Orang

Sumber : *Dokumen Desa Pelalangan Tahun 2016*

c. Sumber Daya Pembangunan

Dari segi hasil pembangunan desa di bidang infrastruktur yang telah berjalan masih sangat kurang, infrastruktur ini masih belum bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat karena kondisi real dari infrastruktur tersebut sudah tidak layak digunakan, kurangnya kesadaran dari masyarakat akan manfaat dari infrastruktur yang dibangun oleh desa dalam memelihara atau merawatnya sehingga infrastruktur tersebut cepat rusak karena kurang terjaga. Berikut beberapa infrastruktur desa yang ada serta kondisinya:

Tabel 4.3
Jumlah Potensi Pembangunan Desa Pelalangan Tahun 2016

No	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Jumlah	Satuan
A	Aset Prasarana Umum		

	d. Jalan Umum	2.400	M
	e. Saluran Irigasi	1.750	M
	f. Kantor Desa	1	Unit
	g. Kantor BPD	-	Unit
	h. Kantor LPMD	-	Unit
	i. Kantor PKK	-	Unit
	j. Kantor Karang Taruna	-	Unit
B	Aset Prasarana Pendidikan		
	a. Gedung PAUD	2	Unit
	b. Gedung TK	1	Unit
	c. Gedung SD/ MI	2	Unit
	d. Taman Pendidikan Al-Qur'an	5	Unit
C	Aset Prasaranan Kesehatan		
	a. Polindes/ PONKESDES	1	POS
	b. Posyandu	-	Unit
	c. MCK Umum	2	Unit
	d. Sarana Air Bersih	2	Unit
D	Aset Prasarana Ekonomi		
	a. Pasar Desa	-	-

Sumber : *Dokumen Desa Pelalangan, Juni 2016*

d. Kondisi Sosial dan Kemasyarakatan

Masyarakat mempunyai peran dalam mewujudkan desa yang makmur, oleh karena itu sebagian dari masyarakat yang memiliki potensi berkumpul dan membentuk suatu kelompok (komunitas), baik dari kesenian maupun hanya mempererat tali silaturahmi antar masyarakat Desa Pelalangan. Beberapa kelompok (komunitas) yang ada di Desa Pelalangan:

Tabel 4.4
Jumlah Potensi Sosial dan Kemasyarakatan Desa Pelalangan Tahun 2016

No	Uraian Sumber Daya Sosial	Jumlah	Satuan
1	Kesenian Hadrah	1	Kelompok
2	Kegiatan Muslimatan	1	Kelompok
3	Kegiatan Sholawatan Rutin	1	Kelompok
4	Kegiatan Istighasah	4	Kelompok
JUMLAH		7	

Sumber : *Dokumen Desa Pelalangan, Juni 2016*

e. Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat di Desa Pelalangan pada tahun 2016 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, angka kemiskinan yang setiap tahunnya mengalami penurunan merupakan salah satu dampak dari masyarakat yang semakin mandiri dalam mendirikan usaha mikro yaitu usaha berbasis kecil namun menguntungkan, dan dengan kemandirian itu masyarakat

bisa menambah pendapatannya. Banyaknya animo masyarakat yang ingin mempunyai usaha baik dibidang kuliner, peternakan maupun perdagangan, tugas yang dilakukan desa adalah menyediakan modal atau dengan memfasilitasi tempat, karena semakin banyaknya masyarakat yang memiliki usaha maka prekonomian masyarakat akan lebih membaik dan akan berdampak pada kurangnya angka kemiskinan di Desa Pelalangan.

f. Kondisi Keagamaan

Untuk keseluruhan Desa Pelalangan penduduknya adalah beragama Islam. Hal itu bisa dilihat dari masjid yang ada di Desa Pelalangan berjumlah 5 masjid, 2 masjid di dusun Pelalangan Selatan, 1 masjid di dusun Kraajan, 1 masjid di dusun Pelalangan Utara, dan 1 masjid di dusun Kauman. Juga bisa dilihat dari banyaknya musholla (langgar) yang rata-rata setiap halaman rumah ada mushollahnya, dengan jumlah sekitar 37 Musholla.

g. Kondisi Pendidikan

Desa Pelalangan sangat peduli akan pentingnya pendidikan bagi masyarakat, oleh karena itu upaya yang dilakukan desa yaitu terus mendukung pembangunan sarana gedung sekolah formal maupun informal, hal itu bertujuan agar bisa memberi kenyamanan pada siswa dalam menjalani proses pembelajaran, pendidikan yang ada di Desa Pelalangan yakni PAUD, SDN, dan MI. sekarang masyarakat Desa Pelalangan sudah bisa menyekolahkan anaknya dari sejak dini,

adanya beberapa sekolah PAUD benar-benar dimanfaatkan oleh setiap masyarakat, karena sebelum adanya PAUD masyarakat menyekolahkan putra-putrinya ke Desa Bendoarum. Adanya bantuan dari Pemerintah membuat masyarakat Pelalangan bisa mengeyam pendidikan secara gratis dan bisa mengurangi angka pengangguran di Desa Pelalangan. Namun sampai saat ini untuk sekolah SMP atau MTs belum ada.

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Perencanaan Tata Kelola Aloksi Dana Desa (ADD) Desa Pelalangan

Desa Pelalangan yang ADD-nya masih lebih sedikit jika di bandingkan dengan desa-desa lain untuk Kecamatan Wonosari, karena Desa Pelalangan penduduknya hanya 2519 jiwa, sedangkan desa lainnya penduduknya sudah di atas 3000 jiwa, hal tersebut berdampak terhadap pendapatan ADD-nya yang lebih kecil dari desa lainnya, oleh karena itu Desa Pelalangan harus bisa mengelola ADD sebaik mungkin demi kesejahteraan rakyatnya.

Untuk melakukan pengelolaan dana yang lebih efektif atau efisien dan tepat sasaran maka perencanaan menjadi sebuah instrumen untuk merespon secara cepat, efisien dan efektif atas masalah dan kebutuhan yang sedang di hadapi oleh desa, perencanaan desa berhasil menumbuhkan partisipasi dari masyarakat untuk memotivasi dalam melangsungkan kehidupannya, dengan cara perencanaan desa harus

berlangsung secara transparan, partisipatif dan bertanggung jawab, agar masyarakat dalam berpartisipasi tidak ada keraguan.

Berdasarkan regulasi perencanaan desa merupakan sistem perencanaan yang menjangkau urusan pembangunan dan menjadi tanggung jawab dari pemerintahan, perencanaan dibuat dalam bentuk rencana strategis sebagai rencana jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah maupun rencana pembangunan tahunan, semua rencana pembangunan yang di agendakan oleh desa salah satunya melalui ADD, pemerintahan desa diberi kewenangan untuk mengelola ADD dengan membuat rancangan perencanaan yaitu dengan cara mengadakan musrenbang dengan lembaga yang ada di desa.

Dengan demikian, desa jadi tau apa yang sedang menjadi keluhan dari masyarakat, karena pada dasarnya perencanaan tidak bisa dilakukan oleh aparat desa saja melainkan harus melibatkan partisipasi dari segenap masyarakat, demi kelancaran perencanaan hal itu perlu dilakukan agar tidak menimbulkan kecemburuan dari masyarakat dan mereka bisa tau bahwa ADD telah dikelola dengan transparan tanpa penyelewengan.

Agar perencanaan bisa berjalan dengan baik maka yang menjadi dasar yakni Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 (pasal 64) yang di jabarkan dalam permendagri nomor 66 tahun 2007 tentang perencanaan pembangunan desa. Karena desa diwajibkan untuk membuat perencanaan sesuai dengan aturan dari pemerintah yakni perencanaan yang memiliki tujuan, membawa perencanaan benar-benar sesuai dengan harapan

masyarakat sehingga agenda pembangunan desa menjadi lebih partisipatif dan responsif pada kebutuhan masyarakat setempat, membuat kepastian pelayanan publik dan pemerataan pembangunan sehingga masyarakat bisa menikmati pelayanan dan pembangunan secara keseluruhan.

Perencanaan yang dilakukan oleh Desa Pelalangan dalam mengelola ADD melalui beberapa langkah, langkah pertama yaitu dengan melakukan MusRenBang (musyawarah rencana pembangunan) yang melibatkan Lembaga Permusyawaratan Desa (LPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), RT, RW, Karang Taruna, Kelompok Tani dan tokoh agama. Hal itu dilakukan guna tercapainya rencana yang telah di agendakan Desa dalam melangsungkan proses pencairan ADD di Desa Pelalangan.

Bapak Faridah selaku RT 02 di Desa Pelalangan mengatakan

“Ketika Desa mau mengadakan musrenbang semua lembaga yang ada di Desa Pelalangan diberi undangan terlebih dahulu, setelah itu berkumpul di balai Desa untuk membahas terkait agenda yang akan dilakukan oleh Desa, apabila sudah mencapai kesepakatan bersama maka langkah selanjutnya bapak KaDes memberi amanah untuk melakukan pendataan terkait masyarakat yang akan menjadi sasaran.”⁷⁵

Dari data diatas dapat dikatakan bahwa semua lembaga yang ada di desa dikumpulkan untuk melakukan musyawarah terkait perencanaan, jika hasil musyawarah hasil tersebut sudah mencapai kesepakatan bersama maka langkah selanjutnya yaitu pendataan yang ditugaskan kepada RT.

⁷⁵ Faridah Wawancara 5 Agustus 2017

Bapak Mufid selaku kepala Desa Pelalangan mengatakan

“Sekarang di setiap kelurahan sudah disediakan dana pembangunan sebesar Rp 300 juta pertahunnya, ini merupakan cara baru yang dilakukan oleh (Bappeda) dengan tujuan memberi kepastian pembangunan untuk masyarakat, karena berkaca dengan dulu, banyak yang di usulkan namun tidak ada kepastian diterima atau tidaknya”.⁷⁶

Dalam wawancara di atas dapat dikatakan bahwa adanya dana Rp 300 juta khusus untuk bidang pembangunan, hal ini merupakan cara baru dari pemerintah guna menjawab usulan dari masyarakat.

Senada dengan yang di sampaikan oleh narasumber diatas, Bapak Faisol selaku Kaur pembangunan juga mengatakan.

“Masyarakat bisa mengusulkan dan langsung mengetahui kapan realisasi pembangunannya, anggaran yang ada diharapkan dapat digunakan kepada kebutuhan yang bersifat darurat. Silahkan masyarakat mengusulkan apapun kebutuhannya, karena kami tidak membatasinya selama kami bisa membantunya, yang pasti dana yang tersedia hanya Rp 300 juta, dan dana tersebut akan kami manfaatkan sebaik-baiknya. Kami juga meminta kepada masyarakat untuk tidak terpaku karena anggaran yang terbatas, karena apapun yang di usulkan masyarakat tetap kami akomodir”.⁷⁷

Dari wawancara di atas dapat dikatakan bahwa Desa akan memanfaatkan dana tersebut sebaik mungkin, dan Desa juga tidak memberi batasan bagi masyarakat yang mau melakukan usulan meskipun dana yang tersedia terbatas.

Alokasi Dana Desa yang diterima oleh setiap Desa harus melalui beberapa prosedur, dan prosedur pencairan bantuan dana dari ADD Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso melalui beberapa tahap.

⁷⁶ Mufid Wawancara 23 Juni 2017

⁷⁷ Faisol Wawancara 23 Juni 2017

Menurut bapak Sikki selaku Kaur Pemerintahan Desa Pelalangan mengatakan:

“Untuk menerima dana ADD kami mengirim pengajuan RPD ke Kecamatan dengan melampirkan diantaranya; Foto Copy Peraturan Desa tentang APBdes untuk tahun bersangkuran misalnya tahun 2016 ini, nota pencairan ADD tahap 1, kuetansi bermatrai, foto copy rekening Kas Desa yang di ligalisir, SPJ tahun sebelumnya yang telah di sahkan oleh camat, surat rekomendasi kelayakan pencairan, laporan penyelenggaraan yang hendak dilakukan oleh Pemerintah Desa, dan sebenarnya masih ada persyaratan tapi paling ndak persyatan yang saya sebutkan tadi itu dilengkapi, setelah acc oleh kecamatan kami tinggal nunggu dana tersebut akan di cairkan nah dan itu akan dikirim ke rekening Kas Desa, kalo dana itu udah cair dari kecamatan akan melakukan pemantauan dan kami disuruh buat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) mengenai uang tadi.”⁷⁸

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa untuk mendapatkan bantuan dana ADD adalah dengan pengajuan persyaratan pencairan dan ADD kepada kecamatan. Yang didalam pengajuan tersebut telah disebutkan beberapa persyaratan yang harus dilengkapi. Jika permohonan tersebut telah disetujui, maka setelah dana tersebut cair harus ada pelaporan penggunaan dana yang disetujui.

Langkah pemerintah desa dalam mengelola ADD rupanya perlahan sudah mulai dirasakan oleh masyarakat, bukti keseriusan pemerintah desa mulai dari tahap perencanaan sampai pada pelaksanaan berjalan dengan apa yang sudah direncanakan, adanya ADD Desa di harapkan dapat meningkat kesejahteraan masyarakat, dengan besaran dana ADD yang diterima oleh Desa Pelalangan Rp 423.154.703. Dari sekian dana yang diterima, pemerintah desa telah membuat rancangan

⁷⁸ Sikki, *Wawancara*, 14 Maret 2017

perencanaan untuk mewujudkan program-program yang ingin dijalankan di Tahun 2016.

Sumber ADD sebagaimana yang telah tertera dalam pasal 4 yaitu sumber ADD terdiri dari 10% (sepuluh per seratus) dari Dana Perimbangan yang diterima kabupaten dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Begitu pula tentang besaran pada pasal 6 telah dijelaskan bahwa besaran ADD setiap Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati. Sedangkan penggunaan ADD dalam pasal 7 dijelaskan bahwasanya ADD digunakan untuk belanja desa dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.

Meskipun desa diberikan kewenangan penuh dalam mengelola ADD oleh Pemerintah tapi Desa Pelalangan sangat berhati-hati dalam mengelolanya. Dengan melakukan perencanaan yang diawali dari proses musrenbang terlebih dahulu agar dalam penerapan dana tersebut dapat berjalan dengan Transparan, Partisipatif dan Akuntabel. Desa Pelalangan mampu mengelola ADD dengan baik dan tepat sasaran, jika dilihat dari tata cara pengelolaan ADD di Desa pelalangan sudah berjalan seperti yang pemerintah inginkan, secara keseluruhan masyarakat sudah mengalami perubahan taraf hidup dengan adanya ADD.

Untuk melancarkan proses pengelolaan ADD, maka dalam musrenbang telah ditentukan para aktor-aktor, mereka telah mendapatkan bagian-bagian yang harus dikerjakan. Konsep kerja yang telah diterapkan

yaitu ada 3 bagian, bagian pertama (Perencanaan), bagian kedua (Pengawasan), dan bagian ketiga (Tanggung Jawab). Untuk bagian perencanaan yang mempunyai peran yaitu Kasi pemerintahan bekerjasama dengan BPdes dan LPMD. Bagian pengawasan meliputi Kasun bekerjasama dengan RW dan RT juga melibatkan Karang Taruna, sedangkan bagian pertanggung jawaban dipegang oleh KaDes bekerja sama dengan SekDes.

Dalam kinerjanya, menurut Huda selaku Kasi Bagian Tata Usaha mengatakan. Bagian perencanaan itu membuat rancangan program-program apa saja yang ingin diterapkan, setelah itu rancangan tersebut dimusyawarahkan bersama, dan jika disepakati maka program tersebut akan segera dilaksanakan, dalam proses pelaksanaannya bagian pengawasan melakukan pemantauan dan memastikan bahwa program tersebut telah dijalankan secara benar, kemudian dari pihak pengawasan membuat laporan kepada pihak penanggung jawab.⁷⁹

Dengan demikian proses pengelolaan ADD di Desa Pelalangan akan berjalan dengan lancar, karena jika melihat dari konsep yang kedua yaitu *partisipatif* artinya dalam mengelola ADD peran aktif masyarakat juga dibutuhkan, dan terbukti dalam proses pengerjaannya semua yang telah mempunyai tugas dari ketiga bagian di atas dengan melibatkan semua orang untuk bergotong royong dan berarti sudah ada pemberdayaan masyarakat di Desa Pelalangan.

⁷⁹ Huda, *Wawancara*, 28 Mei 2017

Oleh karena itu budaya masyarakat berpengaruh pada proses realisasi ADD yang bersifat partisipatif, namun masyarakat Desa Pelalangan secara turun menurun masih kental dengan sikap kepeduliannya antar sesama, rasa partisipasinya sangat tinggi seperti dalam kasus ketika ada seseorang ingin memindah rumahnya, maka orang tersebut hanya dengan datang kerumah warga dan meminta waraga untuk memberi bantuan tenaganya, dan tanpa upah hanya bermodal terima kasih para warga akan membantunya.⁸⁰

Tidak hanya itu, ketika diumumkan bahwa akan dilaksanakan pembersihan lingkungan maka masyarakat juga sigap meluangkan waktunya demi kebersihan lingkungannya, dan banyak lagi kekompakan atau rasa empati antar sesama yang budayakan oleh masyarakat Pelalangan. Dengan budaya masyarakat seperti itu desa harusnya bisa memanfaatkannya dan menjadikannya lebih optimal lagi dalam mengelola ADD.

2. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Pelalangan

Kabupaten Bondowoso merupakan salah satu dari beberapa kabupaten yang merencanakan dan melaksanakan kebijakan ADD. Pelaksanaan ADD di Kabupaten Bondowoso ini didasarkan pada realita bahwa sebagai pilar otonomi daerah desa semakin membutuhkan pendanaan yang seimbang untuk menjalankan peran yang lebih konkrit dalam pembangunan daerah. Kabupaten Bondowoso berharap dengan

⁸⁰ Sumber, *Pengamatan*, 28 Mei 2017

adanya ADD, perencanaan partisipatif berbasis masyarakat akan lebih berkelanjutan, karena masyarakat dapat terlibat langsung dalam pembuatan dokumen perencanaan di desanya dan ikut merealisasikannya.

Sebagaimana yang telah tertera dalam peraturan Bupati tentang tata cara Pengalokasian ADD tahun 2016: Tentang Prinsip Pengelolaan ADD Pasal 3, bahwasanya ADD dikelola berdasarkan prinsip transparan, akuntabel, dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka. Seluruh kegiatan ADD harus dapat dipertanggung jawabkan secara administratif, teknis dan hukum.

Dengan demikian pengelolaan ADD harus dipertanggung-jawabkan sebagaimana yang tertera dalam pasal 37 yaitu ADD yang diterima oleh desa wajib dipertanggung-jawabkan dalam bentuk SPJ sesuai peraturan perundang-undangan. SPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggung-jawabkan setiap bulan dalam tahun berjalan. Biaya Penunjang Kegiatan yang diterima Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kecamatan penggunaan dananya dipertanggung-jawabkan oleh Camat. Biaya Penunjang Kegiatan yang diterima Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kabupaten penggunaan dananya dipertanggung jawabkan dengan membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) setiap bulan oleh Bagian Pemerintahan.

Setelah pengelolaan ADD sudah sampai pada tahap penyelesaian maka kemudian dilakukan pelaporan sebagaimana yang tertera pada pasal

38 yaitu realisasi dan pertanggungjawaban ADD wajib dilaporkan secara rutin dengan ketentuan sebagai berikut. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa melaporkan perkembangan Realisasi Fisik dan Keuangan disertai SPJ penggunaan ADD setiap bulan kepada Camat. Untuk PPKBD dan Sub PPKBD tanda terima dilaporkan setiap bulan kepada Badan PPKB melalui Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan PPKB di kecamatan. Camat menyampaikan laporan rekapitulasi perkembangan realisasi Fisik dan keuangan berdasarkan SPJ penggunaan ADD disertai SPJ Kepala Desa yang disampaikan kepada Bupati melalui Bagian Pemerintahan.

Apabila dalam pengelolaan ADD terjadi penyelewengan atau tidak sesuai dengan aturan dari Bupati maka akan dikenakan sanksi sebagaimana dalam pasal 41 yaitu bagi desa yang melanggar terhadap ketentuan Peraturan Bupati ini dikenakan: sanksi penangguhan pencairan ADD tahap berikutnya, dan sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan, bentuk pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: penyimpangan penggunaan ADD, dan tidak menyampaikan laporan SPJ, pelanggaran hukum terhadap pengelolaan ADD akan diproses sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸¹

Desa Pelalangan yang terletak di Kecamatan Wonosari bagian wilayah Kabupaten Bondowoso meruapan salah satu Desa yang tergolong berhasil dalam melaksanakan ADD, keberhasilan dalam mengelola ADD di Desa Pelalangan ditunjukkan dengan tercapainya tujuan Alokasi

⁸¹ Perbub, *Nomer 8 tahun 2016*

Dana Desa di Desa Pelalangan yaitu terealisasinya kegiatan yang didanai baik fisik, ekonomi, maupun sosial sudah sesuai dengan prosedur pelaksanaan, ada beberapa tahapan yang dilakukan dalam konsep pelaksanaan yaitu tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan (evaluasi), pelaporan, dan tahap pemeliharaan (pelestarian).

Dari pembahasan di atas diketahui bahwa indikator keberhasilan pencapaian tujuan dalam pelaksanaan ADD di Desa Pelalangan selain ditunjukkan dengan terealisasinya kegiatan yang didanai sesuai dokumen perencanaan, juga ditunjukkan dengan meningkatnya partisipasi dalam melaksanakan mulai dari sosialisai, perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan. Bahkan kebijakan ini sedikit memberi dampak terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes).

Selanjutnya Bapak Madrais selaku ketua RT 01 di Dusun Pelalangan Selatan mengatakan bahwa: keberhasilan pelaksanaan ADD di Desa Pelalangan ini tidak terlepas dari peranan pemdes dan tim teknis dalam membangun kerja sama dengan masyarakat desa. Menurut pengamatan saya banyak perubahan yang terlihat, yang paling jelas karena saya sendiri seorang petani, dengan ADD infrastruktur pertanian menjadi lebih baik. Diiringi dengan perbaikan sistem pengairan dan pola tanam, maka hasil panen menjadi lebih baik, dan kami para petani jadi lebih antusias dalam menggarap sawah, karena hasil panen meningkat jadi pendapatan petani ikut meningkat.⁸²

⁸² Madrais, *Wawancara*, 28 Mei 2017

Pemaparan tokoh masyarakat di atas merupakan sebagian kecil informasi tentang sejauhmana ADD berhasil dilaksanakan sesuai dengan rencana dan manfaatnya cukup dirasakan oleh masyarakat Desa Pelalangan. Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tahun 2016 pemerintah Desa Pelalangan melakukan beberapa upaya melalui program-program yang akan diterapkan dengan mengikut sertakan masyarakat untuk melihat potensi yang ada di desa dan pemerintah desa mengajak masyarakat untuk memanfaatkan potensi tersebut guna meningkatkan taraf hidup masyarakat, karena bagaimanapun juga program yang dijalankan oleh Desa tujuan hanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 4.5
Pengelolaan ADD di Desa Pelalangan Tahun 2016

KD	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	413.226.756.00
1	Pembiayaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan	204.000.000.00
2	Kegiatan Operasional Kantor Desa	117.868.164.00
3	Kegiatan Operasional BPD	5.000.000.00
4	Kegiatan Operasional TP-PKK	1.000.000.00
5	Kegiatan Operasional LPMD	5.000.000.00
6	Rehabilitasi Kantor Desa	71.358.592.00
KD	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	444.612.582.00
1	Pembanguna Plengsengan	163.684.571.00
2	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan	38.479.664.00
3	Penyediaan Prasarana Pendidikan PAUD	15.000.000.00

4	Kegiatan Pembangun Sarana Air Bersih	162.048.347.00
5	Kegiatan Pembangunan Duiker	66.400.000.00
KD	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	49.530.000.00
1	Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	23.400.000.00
2	Dana Hibah Kegiatan Guru Ngaji	15.200.000.00
3	Dana Hibah Kemakmuran Tempat Ibadah	8.000.000.00
4	Pembinaan Kelembagaan Desa	2.930.000.00
KD	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	190.540.000.00
1	Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB	4.000.000.00
2	Kegiatan Pelatihan Kelompok Tani	25.250.000.00
3	Peningkatan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	30.220.000.00
4	Penghijauan dan Pembersihan Saluran Irigasi	10.000.000.00
5	Penyuluhan PHBS untuk Masyarakat	22.200.000.00
6	Program Makanan Tambahan (PMT) Balita	4.080.000.00
7	Program Makanan Tambahan (PMT) Lansia	3.600.000.00
8	Program Kelas Kesehatan Ibu Hamil	400.000.00
9	Program Kelas Kesehatan Balita	1.200.000.00
10	Program Kelas Kesehatan Lansia	140.000.00
11	Program Makanan Tambahan (PMT) Lansia	2.250.000.00
12	Program Rutin Penyuluhan Kader POSYANDU	1.600.000.00
13	Pelatihan Usaha Pertukangan	18.900.000.00
14	Pelatihan Usaha Perbengkelan	11.200.000.00

15	Peningkatan Usaha Perdagangan	32.500.000.00
16	Pelatihan Usaha Konveksi	17.400.000.00
17	Penyuluhan Ibu Hamil	3.600.000.00
18	Peningkatan Pengetahuan Masyarakat	2.000.000.00

Sumber: *Dokumen Desa Pelalangan tahun 2016*

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa bentuk pengelolaan ADD tahun 2016 pada bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebesar Rp 41.322.675.600. Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp 44.461.258.200, Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp 4.953.000.000, Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp 19.054.000.000. Dalam hal ini, Desa Pelalangan dalam mengelola ADD Tahun 2016 dari ke 4(empat) bidang menunjukkan presentase sebesar Rp 109.790.933.800. Karena terbatasnya ADD yang diterima oleh Desa Pelalangan, membuat Pemerintah Desa harus berfikir panjang dalam mengelola ADD agar lebih berguna dan bermanfaat bagi masyarakat.

Menurut Ibu Nurfadilah selaku masyarakat Desa Pelalangan mengatakan pelaksanaan ADD di Desa Pelalangan sangat membantu terhadap kehidupan masyarakat khususnya dalam bidang pemberdayaan masyarakat, dalam bidang ini masyarakat sudah banyak yang merasakan manfaat dari adanya dana ADD, seperti diadakannya pelayanan kesehatan dengan memberi pengobatan secara gratis bagi masyarakat yang membutuhkan. Desa juga memberi bantuan modal yang di ambil dari ADD bagi masyarakat yang mau berwirausaha, sedangkan bagi

masyarakat yang sudah memiliki usaha diberi bantuan berupa alat-alat guna kelancaran usaha tersebut.⁸³

Bapak Samsuddin selaku (SEKDES) Desa Pelalangan Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso mengatakan:

“Pengelolaan ADD secara keseluruhan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bondowoso kalo nggak sudah megalami peningkatan, dengan keberhasilan tersebut Kabupaten Bondowoso dapat menekan angka kemiskinan dari 20% hingga 9%.”⁸³

Dari hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa pengelolaan ADD pada tahun 2016 secara keseluruhan sudah tepat sasaran dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, jika dalam mengelola ADD bisa lebih diseriuskan lagi maka angka kemiskinan di Kabupaten Bondowoso bisa diminimalisir lagi dari sebelumnya.

Pada tahun 2016 Desa Pelalangan mendapat dana ADD sebesar Rp 423.154.703. Dana tersebut dipergunakan untuk operasional dan kegiatan Desa. Desa Pelalangan merupakan lembaga pemerintahan yang ada di Kecamatan Wonosari. Bapak Hadi Rahmat H. (kasun sealatan) mengatakan bahwa jumlah penduduk di Desa Pelalangan pada tahun 2016 sebanyak 2519, laki-laki 1275 dan perempuan 1244, penduduk yang masih berusia produktif dari 20-49 tahun sekitar 995 Orang. Hal ini tentu merupakan modal berharga bagi pengadaan tenaga produktif dan SDM.⁸⁵

Mufid selaku Kepala Desa di Desa Pelalangan Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso, mengatakan:

⁸³ Nurfadilah *Wawancara* 5 Agustus 2017

⁸³ Samsuddin, *Wawancara*, 13 Maret 2017

⁸⁵ Hadi Rahmad H, *Wawancara*, 13 Maret 2017

“Program yang ingin saya terapkan belum semuanya berjalan, meski sebagian sudah berhasil saya jalankan namun masih ada beberapa program yang belum bisa, karna saya harus fokus sama program yang saat ini saya jalankan yaitu melatih keterampilan masyarakat dalam memasak maupun yang punya keterampilan membuat kue, dengan mengajak seluruh masyarakat khususnya ibu-ibu. Jadi saya membuat jadwal seminggu sekali melakukan kegiatan itu ditiap RT, dan harapan saya setelah masyarakat mengikuti kegiatan tersebut bisa mandiri dan dapat menambah pendapatan entah dengan berjalan maupun menerima pesanan”⁸⁶

Dari wawancara di atas dapat dikatakan bahwa masih ada program desa yang belum berjalan, karena desa sedang menjalankan salah satu program yaitu melatih keterampilan masyarakat dalam hal memasak yang bertujuan untuk menambah pendapatan dan bisa mensejahterakan masyarakat.

Selain itu Desa Pelalangan juga membangun dan memberikan pelayanan seperti; Membangun sarana prasarana yang dibutuhkan desa untuk menciptakan lapangan pekerjaan dengan mengikutsertakan masyarakat dalam menggunakan teknologi sederhana agar bias mengikuti perkembangan jaman dan meningkatkan keterampilan masyarakat Desa dalam pengendalian, monitoring dan pemeliharaan prasarana. Hal itu bertujuan agar masyarakat bisa bersaing dalam dunia kerja dan bisa menambah pendapatannya,

Dalam bidang kesehatan pemerintah Desa Pelalangan sangat memperhatikan demi meningkatkan derajat kesehatan masyarakatnya dengan mendirikan Polides (Poli Klinik Desa) dan Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu). Dengan dibangunnya kedua pelayanan kesehatan

⁸⁶ Mufid, *Wawancara*, 13 Maret 2017

tersebut supaya memberi dampak positif bagi masyarakat, dan dengan adanya pelayanan tersebut masyarakat bisa hidup sehat dan mendapatkan pengobatan gratis, dan terbukti bahwa hal ini cukup memberikan banyak manfaat bagi masyarakat khususnya masyarakat menengah ke bawah.

3. Dampak ADD Terhadap Masyarakat Desa Pelalangan

Pengelolaan ADD di Desa Pelalangan yang terbukti sangat membantu terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, hal itu bisa dilihat dari angka kemiskinan yang tiap tahunnya mengalami penurunan artinya setiap tahunnya pula di Desa Pelalangan mengalami peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan tersebut di dukung atas semangat kerja masyarakat Desa yang memang sejalan dengan komitmen pemerintah untuk terus merubah kehidupan masyarakat menjadi lebih baik lagi. Beberapa perbaikan dan pembenahan terkait mekanisme pencairan ADD terus dilakukan yakni dengan menerapkan proses cepat dan efektif.

Selain itu upaya yang dilakukan pemerintah yaitu ingin merubah skema pembagian ADD menjadi 60% dibagi rata sedangkan 40% dibagi berdasarkan empat kriteria yakni, kepadatan penduduk, luas wilayah, kondisi geografis, dan angka kemiskinan. Selama ini skemanya 90% dibagi rata sedangkan 10% dihitung berdasarkan keempat kriteria tersebut, jika upaya tersebut berhasil dilakukan maka peluang desa dalam meningkatkan kesejahteraan akan lebih terjamin.

Dampak dari adanya posyandu dirasakan oleh Ibu Rodiyah selaku masyarakat di Desa Pelalangan mengatakan.

“Dengan adanya posyandu yang diadakan seminggu sekali oleh dinas kesehatan, membuat saya lebih tau tentang makanan yang layak atau tidaknya untuk di konsumsi oleh ibu hamil hamil seperti saya, ibu bidan memberi nasehat kepada saya agar memperhatikan kesehatan karena kesehatan ibunya menyangkut kesehatan pada bayinya juga, terutama menyangkut makanan yang bagus untuk gizi bayi,”

Begitu pula seperti yang dirasakan oleh Ibu Musyarrofah yang mempunyai anak balita mengatakan.

“Dengan adanya posyandu masyarakat merasa terbantu, khususnya saya pribadi yang mempunyai balita, setiap balita yang datang keposyandu akan di periksa kesehatannya, kemudian di beri fitamin, dan Ibunya juga diberi wawasan tentang makanan yang bagus untuk dikonsumsi oleh balita selain ASI.”

Dari hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa masyarakat Desa Pelalangan terbantu dengan adanya posyandu yang diadakan setiap satu minggu sekali, dalam kegiatan posyandu, dinas kesehatan tidak hanya sekedar mengobati atau menerima keluhan masyarakat, namun yang dilakukan oleh dinas kesehatan memberi wawasan kepada masyarakat pentingnya menjaga kesehatan dengan cara pola hidup sehat dan mengkonsumsi makanan yang layak untuk dikonsumsi.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yakni menganjurkan untuk setiap Desa agar mengelola ADD dalam tiga hal. Pertama infrastruktur, kedua pelayanan sosial dasar, ketiga peningkatan kapasitas ekonomi. Meski pemerintah pusat lebih menganjurkan pengelolaan ADD diperuntukan pada

pembangunan infrastruktur namun untuk bidang sosial dan bidang ekonomi tetap dilakukan oleh pemerintah desa pelalangan. Keberhasilan Desa Pelalangan dalam mencairkan ADD dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga bisa dilihat dari berbagai capaian yang dilakukan oleh Desa, dan hal tersebut terus dilakukan karena pemerintah pusat setiap tahunnya juga meningkatkan jumlah ADD guna mendukung program Desa, pada tahun 2015 jumlah ADD yang diberikan 300 juta setiap tahunnya, di tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi 600-800 juta setiap tahunnya, artinya ada kenaikan 100% setiap tahunnya.

Dengan demikian, upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Pelalangan akan lebih merata, seperti yang dirasakan oleh Ibu Wasi'ah selaku masyarakat Desa Pelalangan mengatakan, bantuan yang diberikan desa , seperti bantuan pemberian air bersih secara gratis bagi masyarakat yang tergolong menengah kebawah seperti ibu Wasi'ah, tapi bagi yang tergolong menengah ke atas dikenakan biaya pembelian meteran.⁸⁶

Tidak hanya itu, bantuan yang diberikan oleh desa melalui ADD juga dirasakan oleh Bapak Samsul selaku masyarakat Desa Pelalangan mengatakan, kini Desa benar-benar peduli terhadap rakyatnya, bantuan yang Bapak Samsul terima berupa pasir 1 mobil, batu-bata sebanyak 1000 dan semen dua sak, jadi beliau cuma membayar ongkos tukang. Bantuan

⁸⁶ Wasi'ah *Wawancara* 28 Juli 2017

tersebut diberikan kepada masyarakat yang tergolong menengah kebawah.⁸⁷

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa upaya Desa Pelalangan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya bisa dikatakan berhasil karena sebagian masyarakat sudah merasakan dampak dari adanya ADD, hal itu belum dirasakan oleh semua masyarakat karena terbatasnya ADD yang diterima oleh desa. Namun upaya pemerintah desa dalam merubah kehidupan masyarakat agar lebih baik sudah bisa dikatakan bagus.

Bantuan yang dirasakan oleh Ibu Arnati selaku masyarakat di Desa Pelalangan sangat membantu terhadap perekonomian Ibu Arnati sehingga dia berterima kasih atas bantuan yang diberikan oleh desa khususnya para janda, bantuan dari desa yang diberikan berupa kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, mie instan dan lauk yang berbentuk sarden.⁸⁸ Tidak hanya itu bantuan dari desa juga dirasakan oleh Bapak Kusnadi selaku masyarakat di Desa Pelalangan, perkembangan yang dirasakan oleh Pak Kusnadi adalah infrastuktur pengairan sawah karena sebelumnya air yang menuju persawahan tidak lancar, hal itu disebabkan sistem pengairan persawahan masih menggunakan perairan seadanya tanpa pembangunan dari desa. Sehingga air tidak mengair ke persawahan warga secara normal, namun setelah adanya pembangunan infrastuktur

⁸⁷ Samsul Wawancara 28 Juli 2017

⁸⁸ Arnati Wawancara 31 Juli 2017

pada sektor perairan kini air yang menuju persawahan menjadi lebih lancar.⁸⁹

Semua pembangunan di Desa Pelalangan baik fisik maupun non fisik tidak terlepas dari ADD, sudah banyak bukti dengan adanya ADD kehidupan masyarakat sedikit banyak mengalami peningkatan, dan itu terjadi tidak hanya di Desa Pelalangan saja bahkan semua desa dapat merasakan dampak positif dari adanya ADD jika para aktor mengelola ADD tersebut dengan tepat sasaran.

Menurut Mahfud selaku tokoh masyarakat Desa pelalangan mengatakan:

“Saya salut sama kinerja para Perangkat Desa karena sudah memberi pelayanan yang bagus sama masyarakat dan tidak pandang bulu mau kaya mau miskin semua dianggap sama rata dalam memberi pelayanan, Perangkat Desanya juga terlihat akrab sama masyarakat, jadi memudahkan masyarakat jika mau menyampaikan keluhan-keluhannya, dan yang saya acungi jempol lagi yaitu Desa memberi pelayanan berupa call center, tujuannya untuk masyarakat yang hendak menyampaikan suara. kalo bantuan yang diberikan Desa menurut saya pribadi sudah cukup memuaskan dari semua bidang baik bantuan sosial maupun ekonomi.”⁹¹

Dari wawancara di atas dapat dikatakan bahwa kinerja Pemerintah Desa Pelalangan menuai pujian dari masyarakat, karena dalam memberi pelayanan cukup memuaskan terdapat masyarakat. Dan bantuan-bantuan yang diberikan Desa melalui beberapa bidang sudah dirasakan oleh masyarakat.

⁸⁹ Kusnadi *Wawancara* 31 Juli 2017

⁹¹ Mahfud, *Wawancara*, 18 Maret 2017

4. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pengelolaan ADD

Dari penyajian data di atas pengelolaan ADD di Desa Pelalangan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pada dampak terhadap masyarakat, sudah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, karena tidak ada kecurangan dalam pengelolaan ADD tersebut, pada tahap perencanaan desa melakukan musrenbang terlebih dahulu sebelum melangkah pada tahap pelaksanaan, dan hasil musrenbang tersebut harus mencapai kesepakatan bersama tentang agenda yang akan dilaksanakan.

Kemudian pada tahap pelaksanaan pemerintah desa sangat berhati-hati dalam mengelola ADD disamping menjaga nama baik selain itu juga ingin merubah kehidupan masyarakatnya agar lebih baik, dengan demikian ADD akan memberi dampak positif terhadap masyarakat, seperti yang telah disampaikan oleh beberapa narasumber tentang dampak ADD bagi masyarakat.

Dalam ekonomi Islam setiap pengelolaan dana yang berlandaskan syariah islam itu artinya dalam proses kelolanya tidak mengandung *riba*, *maisir*, dan *gharar*, dan dalam pengelolaannya harus sesuai dengan prinsip ekonomi islam, seperti yang tertera dalam prinsip ekonomi islam yang pertama yakni; bertujuan mencapai masyarakat yang sejahtera baik di dunia maupun di akhirat, terpenuhinya kebutuhan jasmani maupun rohani, secara seimbang maupun perorangan. Seperti dalam firman Allah Q.S Al-Baqarah ayat 168 dan yang berbunyi sebagai berikut.

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya; “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di muka bumi ini, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syetan, karena sesungguhnya syetan (adalah) musuh yang nyata bagimu (Q.S Al-Baqarah: 168)”

Dan firman Allah SWT dalam Al.qur’an surat Al-Baqarah ayat 278-279 yang melarang umatnya untuk berbuat riba.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَکُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِکُمْ لَا تُظْلَمُونَ وَلَا تَظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya; “Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu, dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, dan bagimu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya (Q.S Al-Baqarah ayat 278-279)”

Ketika proses pengelolaan ADD sudah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yakni adil dan sama sekali tidak ada kecurangan di dalamnya, maka dalam pengelolaan tersebut sudah terjamin kehalalannya, dan pengelolaan ADD di Desa Pelalangan salah satu dari sebagian desa yang mengelola ADD sudah sesuai dengan prinsip ekonomi islam, hal itu bisa dilihat dari hasil penelitian tentang pelaksanaan ADD di Desa Pelalangan pada tahun 2016 yang berhasil mengelokasikan ADD untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seperti dalam firman Allah Q.S Al-Hud ayat 85 yang berbunyi sebagai berikut.

وَيَقَوْمٍ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ
أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعَثُوا فِي الْأَرْضِ مُمْسِدِينَ ﴿٨٥﴾

Artinya; “Dan Syu’aib berkata; Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan berbuat kerusakan. (Q.S Al-Hud ayat 85)”

Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan ADD yang dilakukan oleh Desa Pelalangan sesuai dengan perspektif ekonomi syariah yaitu untuk membantu meningkatkan, mengembangkan usaha dan kemampuan masyarakat yang berpotensi dan masyarakat yang memiliki usaha yang berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan dan kualitas kerja mereka. Bantuan dari ADD tersebut sesuai dengan Q.S. At-Taubah ayat 71 yang berbunyi sebagai berikut:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ
اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. At-Taubah: 71)”

Jika dilihat dari budaya kerjanya. Desa sudah bekerja semaksimal mungkin demi tuntutan dari pemerintah, yaitu mengalokasikan ADD guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan upaya yang dilakukan oleh desa menuai keberhasilan, jadi kinerja para aparat desa dengan segenap masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam mensukseskan program yang dilakukan oleh desa bisa dikatakan bagus dan hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S At-Taubah ayat 105 dan yang berbunyi sebagai berikut:

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya: “ Dan katakanlah; bekerjalah kamu maka kamu Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan,” (Q.S. At-Taubah: 105)”

Allah SWT juga berfirman dalam Q.S Al-Qhasash ayat 77 tentang cara memperoleh kebaikan dengan berbuat baik antar sesama umat islam, ayat tersebut berbunyi sebagai berikut.

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۗ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya; “Dan carilah pada apa yang telah di anugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah

berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan (Q.S Al-Qhasash: 77)”

Dalam pengelolaan ADD di Desa Pelalangan Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso sesuai dari hasil wawancara dapat dikatakan bahwa bentuk penyaluran ADD yang berupa Penyelenggaraan, Pembangunan, Pembinaan dan Pemberdayaan masyarakat benar-benar disalurkan secara transparan, akuntabel dan parsitipatif, mereka yang mendapatkan bantuan baik social maupun ekonomi telah benar-benar disurvei layak atau tidaknya untuk mendapatkan bantuan tersebut. Hal ini dapat meminimalisir adanya penyalahgunaan dana ADD. Ini sesuai dengan Q.S. An-Nisa’ ayat 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: ”Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.”(Q.S. An-Nisa: 58)”

Dan dalam firman Allah SWT Q.S Al-Anfal ayat 27 di jelaskan kepada umatnya untuk jangan mengingkari amanat yang telah dipikulnya, ayat tersebut berbunyi.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ

تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

Artinya; “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. (Q.S Al-Anfal ayat 27)”

Ayat diatas menjelaskan tentang pentingnya suatu amanat yang telah dipercayakan untuk tidak diingkari, jika dikaitkan dengan yang terjadi di Desa Pelalangan dalam mengelola ADD, merupakan amanat dari pemerintah untuk mengelola ADD dengan tepat sasaran, dan hal itu sudah dilakukan oleh pemerintah Desa Pelalangan.

C. Pembahasan Temuan

1. Perencanaan tata kelola ADD di Desa Pelalangan

Pengelolaan ADD di Desa Pelalangan tiap tahunnya selalu mengalami peningkatan dan jika di buat perbandingan dengan tahun sebelumnya maka tampak lebih jelas perubahan yang di alami oleh Desa Pelalangan, yang pertama kita lihat dari kondisi SDA, SDM. Sumber daya alam yang ada di desa pelalangan rata-rata adalah persawahan dan selebihnya perkebunan, desa berharap dengan memanfaatkan SDA tersebut mayarakat bisa menambah pendapatannya yakini dengan mengikuti bimbingan yang di adakan oleh desa.

Dalam hal peningkatan keterampilan para SDM, Desa Pelalangan mengadakan pembinaan, pelatihan, dan pembimbingan tanpa terkecuali semua masyarakat Desa Pelalangan laki-laki maupun perempuan akan

diberi pembinaan, pelatihan dan pembimbingan baik yang akan memulai usaha maupun yang usahanya sudah mulai berjalan, masyarakat yang akan memulai usaha akan diberi pembinaan terlebih dahulu, kemudian akan di beri pelatihan guna membangun jiwa kewirausahaannya.

Bagi usahanya yang sudah berjalan maka tugas desa selanjutnya yakni memberi bimbingan agar masyarakat yang sudah mempunyai usaha bisa menambah lagi hasil pendapatannya dari sebelumnya, karena dengan bertambahnya masyarakat yang mempunyai usaha maka otomatis Desa Pelalangan telah meningkatkan ekonomi masyarakat yakni dengan cara membangun jiwa wirausaha untuk masyarakat, tidak hanya itu desa juga berhasil mengurangi angka kemiskinan dengan membuka lapangan pekerjaan bagi yang mempunyai usaha.

Keberhasilan Desa Pelalangan dalam mengelola ADD tidak terlepas dari peran pemerintah desa dan juga segenap masyarakat, dengan jiwa kepemimpinan yang sangat tegas dari kepala Desa Pelalangan membuat pemerintahannya semakin tepat sasaran dalam mengelola ADD karena dalam pengelolaanya sangat berpegang teguh dengan peraturan yang telah ditentukan oleh bupati, dan desa sangat memperhatikan betul apa yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat.

Jika dilihat dari prinsip-prinsip pengelolaan dalam peraturan bupati yaitu ADD harus dikelola dengan transparan, akuntabel, partisipatif dan dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dari prinsip yang pertama tersebut desa Pelalangan mengelola ADD dengan

transparan yakni dalam tata kelolanya desa tidak melakukan penyelewengan, semua yang direncanakan oleh desa tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sistem pengelolaannya memanfaatkan peran aktif segenap masyarakat agar masyarakat juga bisa berpartisipasi dalam proses pengelolaan ADD.

Prinsip yang kedua yakni seluruh kegiatan yang di danai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka. Sistem pengelolaan ADD di Desa Pelalangan dilakukan dengan tertata dari perencanaannya, pelaksanaannya dan selalu dilakukan evaluasi agar masyarakat bisa tahu bahwa desa dalam mengelola ADD sama sekali tidak melakukan kecurangan, dan ADD di Desa Pelalangan dikelola berdasarkan aturan dari bupati.

Melihat prinsip yang ketiga yakni seluruh kegiatan ADD harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum, dengan adanya prinsip tersebut membuat Desa Pelalangan sangat berhati-hati dalam mengelola ADD, dalam sistem pengelolaannya jika bercermin dari prinsip yang ketiga maka Desa Pelalangan sudah benar karena dalam mengelolanya sudah terbentuk tiga tim yakni bagian perencanaan, pengawasan dan bagian penanggungjawab.

ADD di Desa Pelalangan dikelola oleh aparat desa dan berkolaborasi dengan sebagian masyarakat yang telah ditunjuk untuk berpartisipasi dalam mengelola ADD tersebut, mereka semua yang mempunyai peran membentuk suatu tim, dan tim yang telah terbentuk

yaitu ada tiga tim, yang pertama tim bagian perencanaan mempunyai tugas untuk membuat konsep tentang rencana yang akan di lakukan oleh desa, tim yang kedua yaitu bagian pengawasan mempunyai tugas mengawasi proses berlangsungnya suatu program sampai pada tahap pelaporan pada tim yang ketiga yaitu bagian pertanggungjawaban yang dipegang penuh oleh kepada desa.

Desa yang mempunyai peran utama dalam mengelola ADD tentunya juga memanfaatkan budaya masyarakat. Begitu pula yang terjadi di Desa Pelalangan, melihat dari budaya masyarakat Pelalangan yakni masih menerapkan budaya dari nenek moyang secara turun menurun masyarakat Pelalangan masih mempunyai sifat peduli antar sesama, rasa simpatinya sangat tinggi, juga kekompakan yang sampai saat ini masih sangat solit semua itu masih dipegang teguh oleh masyarakat Pelalangan.

Hal seperti itu yang dinilai sangat dibutuhkan oleh desa, karena tanpa masyarakat yang kompak desa tidak akan berarti, kekompakan masyarakat yang ada di Desa Pelalangan membuka peluang penuh bagi aparat desa dengan mengikut sertakan masyarakat dalam mensukseskan program-program yang akan dilakukan oleh desa. Setiap program yang dijalankan oleh Desa melibatkan pasti melibatkan masyarakat, hal itu dilakukan agar masyarakat tahu kemana alur ADD di Desa Pelalangan.

Bisa dilihat dari hasil pembahsan tentang budaya masyarakat, bahwasanya masyarakat yang ada di desa Pelalangan mempunyai kekompakan yang sangat solit dan hal itu terbukti ketika desa mangajak

masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembersihan lingkungan, tidak hanya itu saja kekompakan masyarakat juga bisa dilihat dari kepedulian antar sesama, semua itu dilakukan karena itu akan kembali pada dirinya sendiri, dan yang terjadi di Desa Pelalangan ketika kita baik sama orang maka kebaikan akan datang sendirinya.

2. Pelaksanaan ADD di Desa Pelalangan

Pada tabel 4.4 dapat dilihat bahwa bentuk penyaluran ADD tahun 2016 pada bidang penyelenggaraan pemerintah desa sebesar Rp 41.322.675.600, pelaksanaan pembangunan desa sebesar Rp 44.461.258.200, pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp 4.953.000.000, pemberdayaan masyarakat sebesar Rp 19.054.000.000. Dalam hal ini, Desa Pelalangan dalam mengelola ADD Tahun 2016 dari keempat bidang menunjukkan persentase sebesar Rp 109.790.933.800. Karena terbatasnya ADD yang diterima oleh Desa Pelalangan, membuat pemerintah desa harus berfikir panjang dalam mengelola ADD agar lebih berguna dan bermanfaat bagi masyarakat.

Dalam pelaksanaan ADD, Desa pelalangan menggunakan beberapa tahapan yaitu; tahap persiapan, tahap perencanaan, tahap pengawasan atau evaluasi, tahap pelaporan, dan tahap pemeliharaan atau pelestarian. Dengan tahapan-tahapan tersebut aparat desa berharap kegiatan yang hendak dilakukan dapat terlaksana sebagaimana yang telah direncanakan, juga untuk kegiatan atau program yang sudah terlaksana

melalui tahapan yang keenam aparat desa berharap agar masyarakat juga ikut memelihara atau melestarikannya.

ADD merupakan dana dari pemerintah pusat yang diberikan kepada pemerintah desa tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Desa memberikan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang sedang dilakukan, setiap program yang diterapkan itu tidak lepas dari pengawasan dan semua pemerintah desa akan diberikan pertanggung jawaban. Setelah program itu selesai, maka harus ada SPJ yang diserahkan kepada kecamatan.

Kemudian akan dilakukan pemantauan dari mengenai hasil program yang dijalankan, program tersebut baru bisa dikatakan berhasil jika dana yang dicairkan benar-benar tepat sasaran artinya tidak ada penyalahgunaan dalam pemanfaatan ADD. Selain itu desa juga memberikan fasilitas kegiatan berupa pelatihan dan bimbingan teknik terhadap masyarakat guna untuk meningkatkan pengetahuan dan bisa menambah pundi-pundi penghasilan.

Bentuk-bentuk pengelolaan ADD Desa Pelalangan Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat berupa penyelenggaraan pembiayaan penghasilan tetap dan tunjangan, kegiatan operasional kantor desa, kegiatan operasional BPD, kegiatan operasional TP-PKK, kegiatan operasional LPMD, pembangunan pembanguna saluran air, sarana dan prasarana kesehatan, penyediaan prasarana pendidikan PAUD,

pembangun sarana air bersih dan pembangunan duiker, pembinaan kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama, dana hibah kegiatan guru ngaji, dana hibah kemakmuran tempat ibadah, pembinaan kelembagaan desa.

Sedangkan untuk pemberdayaan pemberdayaan posyandu, UP2K dan BKB, pelatihan kelompok tani, peningkatan dan pengembangan (BUMDes), penghijauan dan pembersihan saluran irigasi, penyuluhan PHBS, program makanan tambahan (PMT) balita, (PMT) lansia, (PMT) ibu hamil, (PKK) ibu hamil, (PKK) balita, (PKK) lansia, penyuluhan kader POSYANDU, penyuluhan ibu hamil, pelatihan usaha pertukangan, pelatihan usaha perbengkelan, peningkatan usaha perdagangan, pelatihan usaha konveksi, peningkatan pengetahuan masyarakat).

Kegiatan yang dilaksanakan oleh desa tidak lain dan tidak bukan tujuannya hanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena masyarakat Desa Pelalangan sangat berpotensi untuk bersaing dalam suatu kewirausahaan, dengan dilaksanakannya kegiatan tersebut pemerintah desa berharap masyarakat bisa belajar mandiri dan bisa membuat usaha sendiri dan hal itu akan meningkatkan hasil pendapatannya dan otomatis kesejahteraannya akan lebih terjamin.

Desa Pelalangan melaksanakan penyelenggaraan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan, semua itu merupakan cara yang dilakukan pemerintah desa agar bisa memperbaiki taraf hidup masyarakat di Desa Pelalangan. Untuk saat ini desa lebih fokus pada bidang

pembangunan, karena yang saya tahu pada bidang pembanguna terus dilakukan pembanguan atau perbaikan infrastruktur-infrastrukur seperti plengsengan, selain itu desa juga menjamin setiap rumah mempunyai air bersih karena sebelumnya masyarakat Desa Pelalangan untuk air minum masih mengambil dari sumur, dan adanya pengeboran air bersih maka sangat berdampak positif bagi masyarakat Pelalangan karena itu menyangkut kesehatan masyarakat.

Pembangunan sarana kesehatan juga dimanfaatkan oleh masyarakat. Masyarakat sangat antusias sekali ketika ada program penyuluhan dari tim kesehatan, jadi apa yang dibangun oleh desa benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat. Sedangkan pada bidang pembinaan bisa dikatakan antusias masyarakat masih 60% yang mengikuti rata-rata yang berumur 20-45, sisanya yang 40% lagi sudah berumur 45 ke atas sudah disibukkan dengan urusannya sendiri.

Desa Pelalangan yang berpenduduk sebanyak 2519, laki-laki 1275 dan perempuan 1244, dengan jumlah penduduk yang sedemikian membuat pemerintah desa harus bekerja keras dalam urusan pelayanan, demi terwujudnya kehidupan masyarakat yang sejahtera salah satunya melalui ADD dan semuanya terbukti dijalankan oleh pemerintah desa sebagaimana yang telah dikatakan Mahfud salah satu nara sumber.

Desa sebagai pengevaluasi dan monitoring terhadap penerima bantuan di lapangan sesuai dengan kenyataan. dan bagi penerima bantuan harus disurvei kelayakannya untuk menerima bantuan tersebut, hal ini

dikarenakan ada proses atau tahapan-tahapan yang harus dilakukan dan pemberian bantuan disesuaikan dengan kekuatan ADD.

3. Dampak ADD terhadap masyarakat di Desa Pelalangan

Dampak dari adanya ADD benar-benar dirasakan oleh masyarakat Desa Pelalangan, terbukti setiap tahunnya angka kemiskinan mengalami penurunan, itu artinya upaya yang dilakukan oleh desa menuai keberhasilan dalam membawa perubahan pada masyarakatnya untuk lebih baik lagi dari pada sebelumnya, upaya untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat juga mendapat dukungan dari masyarakat yang sangat berantusias dengan cara ikut berpartisipasi dalam proses pelaksanaan program pemerintah desa.

Beberapa perbaikan maupun pembenahan terus dilakukan oleh pemerintah Desa Pelalangan terkait mekanisme pencairan ADD yaitu dengan cara menerapkan proses cepat dan efektif. Hal itu dilakukan guna mencegah penundaan program yang akan dilaksanakan, karena jika dilakukan dengan cepat dan efektif maka proses peningkatan kesejahteraan masyarakat akan semakin cepat pula dirasakan oleh masyarakat.

Upaya pemerintah yang ingin merubah skema pembagian ADD menjadi 60% dibagi rata, sedangkan 40% dibagi berdasarkan kepadatan penduduk, luas wilayah, kondisi geografis, dan angka kemiskinan. Jika keinginan tersebut berhasil dilakukan maka peluang desa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya akan lebih terjamin.

Meskipun pemerintah pusat menganjurkan pada semua desa untuk lebih fokus pada pembangunan fisik seperti pembangunan sarana pendidikan, perbaikan jalan dan perbaikan pengairan, namun Desa Pelalangan tidak hanya fokus pada bidang fisik saja melainkan pada bidang ekonomi dan sosial, seperti yang dirasakan oleh beberapa masyarakat Pelalangan yang sudah merasakan manfaat dari adanya ADD yang diberikan oleh pemerintah.

Bantuan yang diterima oleh ibu Wasi'ah salah satunya, beliau mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada desa karena telah diberi bantuan berupa air bersih yang mana bantuan tersebut memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, dan bantuan tersebut tidak hanya dirasakan oleh Ibu Wasi'ah melainkan juga semua masyarakat. Lain halnya yang dirasakan oleh Bapak Samsul yang menerima bantuan berupa pasir, batu bata dan semen, bantuan tersebut diberikan agar masyarakat bisa mempunyai tempat tinggal yang lebih layak dan nyaman.

Bantuan dalam bidang ekonomi dirasakan oleh ibu Nurfadilah yang mempunyai usaha pembuatan kue, beliau menerima bantuan berupa alat-alat pembuatan kue seperti mikser, blender dan alat-alat lainnya, bantuan tersebut diberikan agar usaha yang ditekuni oleh Ibu Nurfadilah semakin berkembang dan bisa menambah pendapatannya. Semua pembangunan di Desa Pelalangan baik fisik maupun non fisik tidak terlepas dari peran ADD, namun semua itu tergantung para aktor yang

mengelola ADD. Jika dikelola dengan tepat sasaran maka akan menghasilkan dampak positif terhadap masyarakat.

4. Analisis Ekonomi Islam

Dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan ADD yang dilakukan oleh Desa Pelalangan sesuai dengan hukum-hukum ekonomi syariah yaitu untuk membantu meningkatkan, mengembangkan usaha dan kemampuan masyarakat yang berpotensi dan masyarakat yang memiliki usaha yang berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan dan kualitas kerja mereka. Serta disalurkan secara langsung dan mereka yang mendapatkan dana tersebut telah benar-benar disurvei layak untuk mendapatkannya.

Semua pengelolaan ADD di Desa Pelalangan melalui proses yang sudah sesuai dengan aturan dari pemerintah, dalam proses pengelolaannya tidak ada dana yang digelapkan artinya semua dana benar-benar dikelola guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jika dilihat dari kacamata ekonomi Islam dalam mengelola dana harus murni tanpa adanya riba, dan dalam ekonomi Islam kesejahteraan memang harus di miliki oleh setiap masyarakat, karena menyangkut kelangsungan hidup seseorang dalam bermasyarakat.

Firman Allah SWT dalam QS Al-Anfal ayat 27 tentang manusia yang harus bersifat adil. Jika ayat tersebut dikaitkan dengan pengelolaan ADD di Desa Pelalangan maka cara pengelolaan yang dilakukan oleh Desa Pelalangan sudah adil karena dalam pengelolaannya tidak memihak

pada salah satu masyarakat namun semua dana dikelola dengan menyeluruh untuk rakyatnya dan untuk menghindari kecurangan ADD di Desa Pelalangan dikelola dengan transparan, akuntabel dan partisipatif.

Sikap adil harus dimiliki oleh setiap umat Islam terutama bagi yang mempunyai jabatan seperti aparat desa, seperti yang dilakukan aparat Desa Pelalangan yakni membawa perubahan dengan perlahan meningkatkan hak-hak dan kewajiban masyarakat melalui dana yang diberikan oleh pemerintah, dari semua yang dilakukan oleh aparat Desa mendapatkan respon positif dari masyarakat, dan masyarakat Desa Pelalangan merasakan dampak dari adanya ADD tersebut. Jadi apa yang dilakukan oleh aparat Desa sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS At-Taubah ayat 71.

Ayat tersebut juga menjelaskan tentang manusia untuk melaksanakan apa yang diperintahkan Allah SWT dan di anjurkan untuk menjauhi larangannya. Hal itu yang menjadi prioritas aparat Desa Pelalangan dalam menjalankan tugasnya, dan yang dilakukan aparat desa sudah mencerminkan kelayakan dalam bekerja yaitu dengan memberi pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, dan berusaha memenuhi semua yang dikeluhkan oleh masyarakat.

Selain itu Allah SWT juga berfirman dalam QS At-Taubah ayat 105. Ayat tersebut menyeru kepada manusia agar mempunyai sikap tolong-menolong antar sesama, dan ketahuilah bahwa semua yang ada di muka bumi ini tidaklah abadi, dan semua yang ada di bumi ini hanya

kenikmatan sesaat yang Allah berikan, oleh karena itu, pada hakikatnya semua itu akan kembali kepadanya. Maka bersyukurlah manusia jika sudah bisa memanfaatkan semua yang telah Allah berikan.

Dalam ekonomi islam sudah di jelaskan barang siapa yang mengelola dana dengan menggunakan syariah islam atau berlandaskan dengan dasar Al,qur'an, Hadist, Ijma', dan Qiyas maka di dalam pengelolaan tersebut sudah mengikuti apa yang dikehendaki oleh Allah SWT. sebagaimana yang telah menjadi tujuan dari ekonomi Islam yakni setiap manusia berhak untuk mempunyai kehidupan yang sejahtera baik dari rohani maupun jasmani salah satunya dengan menyalurkan ADD dengan tepat sasaran.

Kendati demikian, masih banyak desa yang melakukan kecurangan dalam mengelola ADD, dari sekian kasus yang beredar rupanya desa masih yang belum sukses dalam mengelola ADD. Kasus tersebut disebabkan oleh aparat desa dan masyarakatnya sendiri, kasus yang sering terjadi dari aparat desa yaitu dana yang harusnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tapi oleh aparat desa dibuat untuk menambah hartanya sendiri, sedangkan kasus dari masyarakatnya yaitu kurangnya rasa bersyukur dari semua yang telah diberikan oleh pemerintah artinya semua yang diberikan oleh pemerintah tidak dimanfaatkan dan masyarakat bisanya hanya meinta ktika sudah diberikan. Masyarakat tidak bisa merawatnya dengan baik.

Tapi semua itu tidak terjadi di Desa Pelalangan, dalam pengelolaan ADD Desa Pelalangan sudah sukses artinya dana tersebut sudah disalurkan dengan tepat sasaran, dan dari masyarakat sudah merasakan manfaat dari adanya ADD, karena aparat desa mengelola ADD sesuai dengan peraturan dari pemerintah, sebagaimana firman Allah dalam QS Al.Qashass ayat 77, dalam ayat tersebut Allah menyerukan kepada umatnya untuk tidak berbuat kerusakan dan senantiasa berbuat baik antar sesama manusia.

Dengan demikian, tata kelola ADD di Desa Pelalangan sudah menuai keberhasilan, dengan tata kelola yang benar maka hak masyarakat untuk menikmati kesejahteraan dalam melangsungkan kehidupannya benar-benar dirasakan oleh masyarakat Pelalangan, karena selama tiga tahun terakhir Desa Pelalangan berada dalam kedamaian dan ketentraman, hal itu dibuktikan karena tidak adanya kerusuhan yang terjadi maupun kasus-kasus tindak kriminal yang sudah tidak dirasakan lagi oleh masyarakat Pelalangan. Ketika semua hak rakyat memang diberikan untuk rakyat maka kesejahteraan rakyat akan terjamin, karena pada dasarnya Allah sangat sangat benci terhadap umatnya yang merebut hak orang lain.

Menurut saya pengelolaan ADD di Desa Pelalangan sudah tepat sasaran karena dari proses perencanaan sampai pada tahap pelaksanaannya terus dalam pengawasan, jadi dalam mengelola dana tersebut desa sudah berhati-hati agar tidak terjadi kecurangan, meskipun tidak ada kecurangan

dalam pengelolaannya, namun rupanya desa masih terkendala oleh ADD yang masih terbatas untuk direalisasikan kesemua bidang.

Dan alangkah lebih baiknya jika dalam proses pengelolaan ADD masyarakat juga dilibatkan, karena selama ini yang tahu secara langsung hanya bagian pemerintahan dan lembaga-lembaga yang ada di desa. Seperti yang telah diperintahkan oleh kabupaten yakni setiap desa harus memaparkan hasil dari pengelolaan ADD dalam bentuk papan nama atau sejenis spanduk, dan spanduk tersebut dipajang. Dengan demikian, masyarakat tidak akan banyak bertanya tentang alur ADD yang dicairkan oleh desa.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dalam penulisan skripsi ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa perencanaan pengelolaan ADD di Desa Pelalangan telah melalui prosedur yang sesuai dengan standar operasional, dengan mengadakan musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) yang melibatkan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM-Desa), tokoh masyarakat dan tokoh agama, RW/RT, kepala dusun, kepala kampung, dan masyarakat sebagai anggota. Musrenbang yang telah disepakati maka bisa dilaksanakan oleh pemerintahan desa.
2. Bahwa pengelolaan ADD di Desa Pelalangan Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso tahun 2016 meliputi empat bidang pelaksanaan, pertama, bidang penyelenggaraan pemerintah desa, kedua, bidang pelaksanaan pembangunan desa, ketiga, pembinaan kemasyarakatan, keempat, bidang pemberdayaan masyarakat. Dari keempat bidang pelaksanaan, bidang pelaksanaan Pembangunan desa dan Bidang pemberdayaan masyarakat menjadi prioritas pembangunan yang diutamakan, karena bidang pelaksanaan pembangunan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat berhubungan langsung dengan kehidupan

masyarakat, dengan tidak mengakhirkan pada bidang pelaksanaan yang lain.

3. Bahwa dampak pengelolaan ADD di Desa Pelalangan berdampak positif terhadap masyarakat, dalam berbagai hal dan aspek kehidupan masyarakat seperti dalam pembangunan infrastruktur desa. Yang telah membangun saluran perairan persawahan dan memberikan bantuan renovasi rumah bagi keluarga yang kurang mampu. Dalam aspek pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa memanfaatkan ADD untuk mengadakan kegiatan pemberdayaan posyandu dan program makanan tambahan PMT lansia .
4. Bahwa Pandangan Ekonomi Islam terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah sesuai dengan hukum perspektif ekonomi Islam. Karena dari hasil penelitian dalam pengelolaan ADD di Desa Pelalangan peneliti tidak menemukan kecurangan yang dilakukan oleh pemerintah desa, dan desa benar-benar memanfaatkan dana ADD untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diberikan saran-saran yang nantinya diharapkan dapat memperbaiki ataupun menyempurnakan pelaksanaan ADD di Desa Pelalangan Kecamatan Wonosari masa mendatang. Saran ini ditujukan untuk:

1. Kepala Desa

Kepala Desa hendaknya memperbaiki proses penyampaian laporan pertanggung jawaban tentang pengelolaan ADD kepada masyarakat. Sehingga masyarakat dapat melihat bagaimana pengelolaan ADD akan lebih baik dan transparan, Kepala Desa hendaknya sosialisasi terhadap kebijakan ADD diberikan kepada masyarakat luas sehingga setelah memahami kebijakan ADD, masyarakat juga akan lebih mudah untuk diajak berpartisipasi dalam pelaksanaan ADD, ikut melestarikan hasil pelaksanaan ADD serta ikut mengawasi jalannya ADD sesuai dengan ketentuan yang ada. Serta membentuk badan pengawas independen dalam proses pengelolaan ADD, sehingga dalam pelaksanaannya akan lebih baik dan terhindar dari penyalahgunaan pengelolaan ADD.

2. Pemerintah Desa

Hendaknya para pelaksana pemerintah desa atau pelaksana ADD diberikan peningkatan pengetahuan melalui pendidikan dan latihan, khususnya yang menyangkut pengelolaan keuangan desa. Sedangkan untuk mempercepat pembuatan SPJ dan laporan pelaksanaan ADD serta mengurangi kesalahan dalam pembuatan dokumen, perlu dibangunnya sistem aplikasi komputer yang memungkinkan akurasi dan kecepatan data.

3. Pemerintah Daerah

Mengutamakan belanja daerah untuk keperluan yang produktif, membangun serta mensejahterakan produk kabupaten dan kota di provinsi Jawa Timur, khususnya daerah Bondowoso. Sehingga perkembangan

perekonomian daerah yang baik akan secara otomatis berdampak pada peningkatan PAD.

4. Masyarakat

Hendaknya Kegiatan ADD yang berbentuk pemberdayaan masyarakat dilaksanakan oleh kelompok-kelompok masyarakat (Pokmas). Hal ini diharapkan akan memberikan kesadaran pada masyarakat bahwa ADD bukanlah untuk kepentingan pemerintah desa namun untuk kepentingan masyarakat. Dan hendaknya masyarakat dapat memelihara dan menjaga hasil pengelolaan ADD yang bersifat fisik ataupun non fisik

Dengan adanya saran yang telah dikemukakan, penulis berharap kebijakan ADD tidak menjadi kebijakan yang politis untuk mendongkrak popularitas pemerintah, namun diharapkan merupakan kebijakan yang berhasil guna bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta lebih mengedepankan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi maupun golongan tertentu saja. Harapan penulis dan semua pihak, kebijakan ADD akan berdampak dan menjadikan desa sebagai garda depan dari sistem Pemerintahan Republik Indonesia serta menjadi cermin atas sejauh mana penyelenggaraan pemerintahan kita. Majunya dan kuatnya desa akan berdampak pada majunya dan kuatnya negara.

DAFTAR PUSTAKA

1. Refrensi Buku

- Abdullah, Rozali. 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Abraham Maslow. 1996. *Teori Pendekatan Hierarti dan Kebutuhan Manusia*. Jakarta: PT PBP
- Adi, Isbandi Rukminto. 2008. *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- _____. 2013. *Kesejahteraan Sosial (Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, Dan Kajian Pembangunan)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Arif, Nur Rianto Al, Euis Amalia. 2010. *Teori Mikroekonomi Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Arif, 2007. *Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa dan Pengelolaan Kekayaan Desa*, Pekanbaru, Red Posi Press
- Fauzia, Ika Yunia, Abdul Kadir Riyadi. 2010. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Heri Riza. Dkk. 2003. *Hubungan Efektifitas Pengelolaan Program Raskin dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Mamahan Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Palaut*, Akta Diurna.
- Hasan Alwi, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed.3-cet2* Jakarta Balai Pustaka.
- Janwari, Adi. 2015. *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Kurniawan, Luthfi J, Dkk. 2015. *Negara Kesejahteraan Dan Pelayanan Sosial*. Malang: Intrans Publishing.
- Karim, Adi Warman. 2003. *Konsep Dasar Ekonomi Islam*, Jakarta: Gramedia.

- Lexy J. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Ed. Rev. Cet 33*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Margono S. 2007, *Metedologi Penelitian Pendidikan Komponen*, Jakarta: Rieneka Cipta.
- Marzuki. 2005. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta. Moleong.
- Miles, Matthew B. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru* (Terjemahan *Qualitative Data Analysis* oleh Tjetjep Rohendi Rohidi, Jakarta: Universitas Indonesia
- Nurcholis, 2011. *Otonomi Desa dalam Pemberdayaan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Narbuko, Cholid, Abu Achmadi. 2009. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nasution, S. 2011. *Metode Research (Penelitian Ilmiah) Ed. 1 Cet 12*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 1989. *Teori Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pusat antar universitas studi sosial universitas Gajah Mada.
- Satori, Djam'an, Aan Komariah. 2013. *Metodologi Pnelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sholahuddin. 2007. *Asas-Asas Ekonomi Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Soetomo. 2014. *Kesejahteraan dan Upaya Mewujudkannya dalam Perspektif Masyarakat Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugino, 2007. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Bandung Alfabeta.
- Teguh, Muhammad. 2005, *Metodelogi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Todaro. 2006. *Pembangunan Ekonomi Edisi kesembilan Jilid 1*, Erlangga

2. Refrensi Jurnal

Departemen Agama RI. 2010. *Alqur'an Dan Terjemah Untuk Wanita*. Bandung: Jabal.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke Tiga*. Jakarta: Balai Pustaka.

Departemen Dalam Negeri Jakarta, *Napak Tilas Penyelenggaraan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam rangka Ekonomi Asli Desa*.

Jurnal Administrasi Publik. Volume 1 Nomor 6

Peraturan Menteri Dalam Negeri. 2014. *Peraturan Penyusunan Alokasi Dana Desa (ADD) T.A. 2014-2015* (Bandung: Fokusindo Mandiri, 2014)

3. Refrensi Web

Asriyah, Wardatul. 2007. *Strategi Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Melalui Usaha Tambak Di Desa Babalan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Jawa Tengah*. Yogyakarta: Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga.

Ayu Purnami Wulandari, 2014 berjudul *Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pelathan Pembuatan Sapu Gelagah di Desa kajongan Kecamatan Bojongsari Kabupaten Perbalingga*.

Abu Rahum, 2015 *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Fisik Desa Kerayan Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser*.

Eliyati, 2012 berjudul *Upaya PNPM Mandiri dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Kebuyutan Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang*.

Juliska Baura 2010, berjudul *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi di Desa Bukumatiti Kecamatan Jailolo Kabuapten Halmahera Barat)*

Muhammad Farkhan, 2008 berjudul *Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Desa (studi di Desa Pulutan Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul)*

- Oktaviani, Rahmawati. 2014. *Upaya Peningkatan Kesejahteraan Perekonomian Masyarakat Melalui Usaha Kripik Belut Di Kelurahan Sidoagung Kecamatan Godean*. Yogyakarta: Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga.
- Okta Rosalinda, 2014 berjudul *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Menunjang Pembangunan Desa di Desa Segodorejo dan Desa Ploso Kerep Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang*.
- Wahono, Hadi. 2016. *Teori dan Konsep Dasar Negara Kesejahteraan*, Jakarta: PT Gramedia
- Riska Yuliani, 2012 berjudul *Analisis Dampak Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dan Kelembagaan Desa di Kabupaten Boyolali*
- Shihab, M. Quraish. 1996, *Wawasan Al, Qur'an*, Bandung: Mizan.
- Siti Ainul Wida, 2016 berjudul *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa-desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi*.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004. *Tentang Pemerintahan Daerah*
- UUD 1945 Alenia IV
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016. *Tentang Perangkat Daerah*
- Widjaja, HAW. 2002. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT
- Wisakti, Daru. 2008. *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Geyer Kabupaten Grogongan Semarang*. Program Pasca Sarjana S2 Dipenogoro Semarang.

BIODATA PENULIS

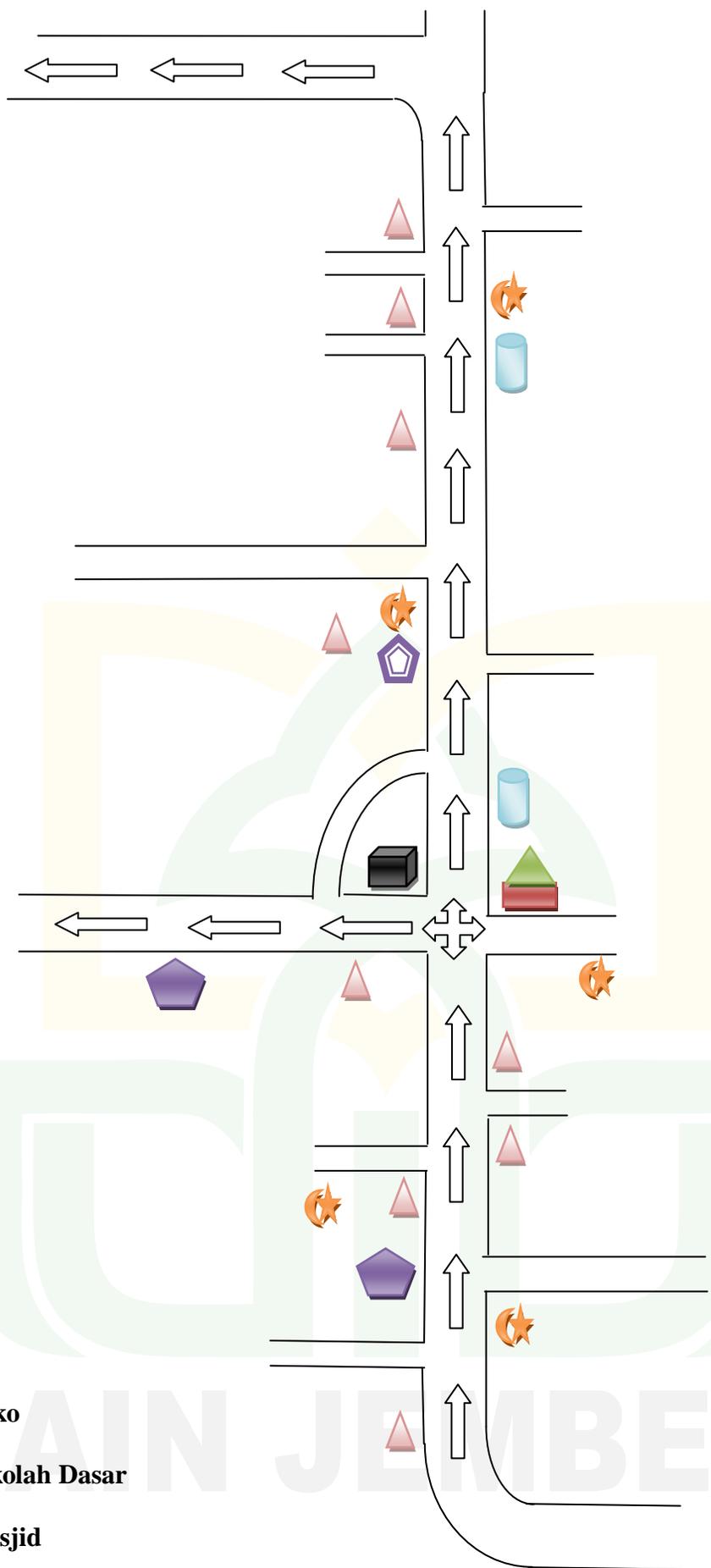


Nama : AINUL HAKKI
NIM : 083 122 125
Tempat, Tgl Lahir : Bondowoso, 20 April 1994
Alamat : Jl. Sukosari, Desa Pelalangan,
Kec. Wonosari, Kab. Bondowoso
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Ekonomi Syariah

1. Riwayat Pendidikan:

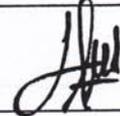
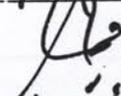
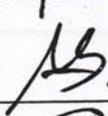
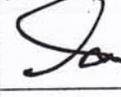
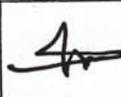
- a. SDN 02 Bendoarum Wonosari, Bondowoso Tahun 2001-2006
- b. MTs Manbaul Ulum Tangsil Wetan, Bondowoso Tahun 2006-2009
- c. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Tahun Bondowoso 2009-2012.
- d. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember Fakultas Ekonomi Dan
Bisnis Islam (FEBI) Jurusan Ekonomi Islam Program Studi
Ekonomi Syariah Tahun 2016-2017

Denah Desa Pelalangan



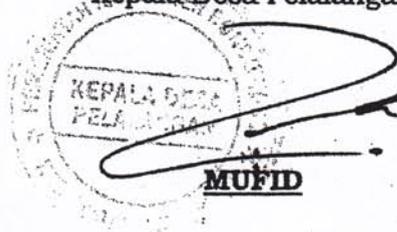
-  :Toko
-  :Sekolah Dasar
-  :Masjid
-  :Kantor Desa Pelalangan
-  :Sekolah Madrasah
-  :Sumber Air

**JURNAL KEGIATAN PENELITIAN
DESA PELALANGAN KECAMTAN WONOSARI KABUPATEN
BONDOWOSO**

No	Tanggal	Kegiatan Penelitian	TTD
1	Senin, 27 Februari 2017	Penyerahan surat penelitian kepada Kepala Desa	
2	Sabtu, 04 Maret 2017	Observasi dan minta data ADD tahun 2016 beserta profil Desa	
3	Senin, 13 Maret 2017	Interview dengan SekDes	
4	Selasa, 14 Maret 2017	Interview dengan Kaur Pemerintahan	
5	Minggu, 28 Mei 2017	Interview dengan ketua RT 01	
6	Jum'at, 23 Juni 2017	Interview dengan Aparat Desa	
7	Kamis, 20 Juli 2017	Wawancara dengan Masyarakat tentang sejarah Desa Pelalangan	
8	Senin, 31 Juli 2017	Wawancara dengan Masyarakat	
9	Jum'at, 28 Juli 2017	Wawancara dengan Masyarakat	
10	Jum'at, 05 Agustus 2017	Wawancara dengan Masyarakat	
11	Senin, 04 September 2017	Mohon pamit dan pengambilan surat keterangan selesai penelitian.	

Bondowoso, 04 September 2017

Kepala Desa Pelalangan



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

DESA PELALANGAN KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN
BONDOWOSO

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AINUL HAKKI
NIM : 083 122 125
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Ekonomi Syariah
Tempat, Tanggal Lahir : Bondowoso, 20 April 1994

Menyatakan dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi yang berjudul
"PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM UPAYA
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA
PELALANGAN KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN
BONDOWOSO TAHUN 2016"

adalah benar-benar karya asli saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian
yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan didalamnya, maka
sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Jember, 31 Agustus 2017

Yang bertandatangan

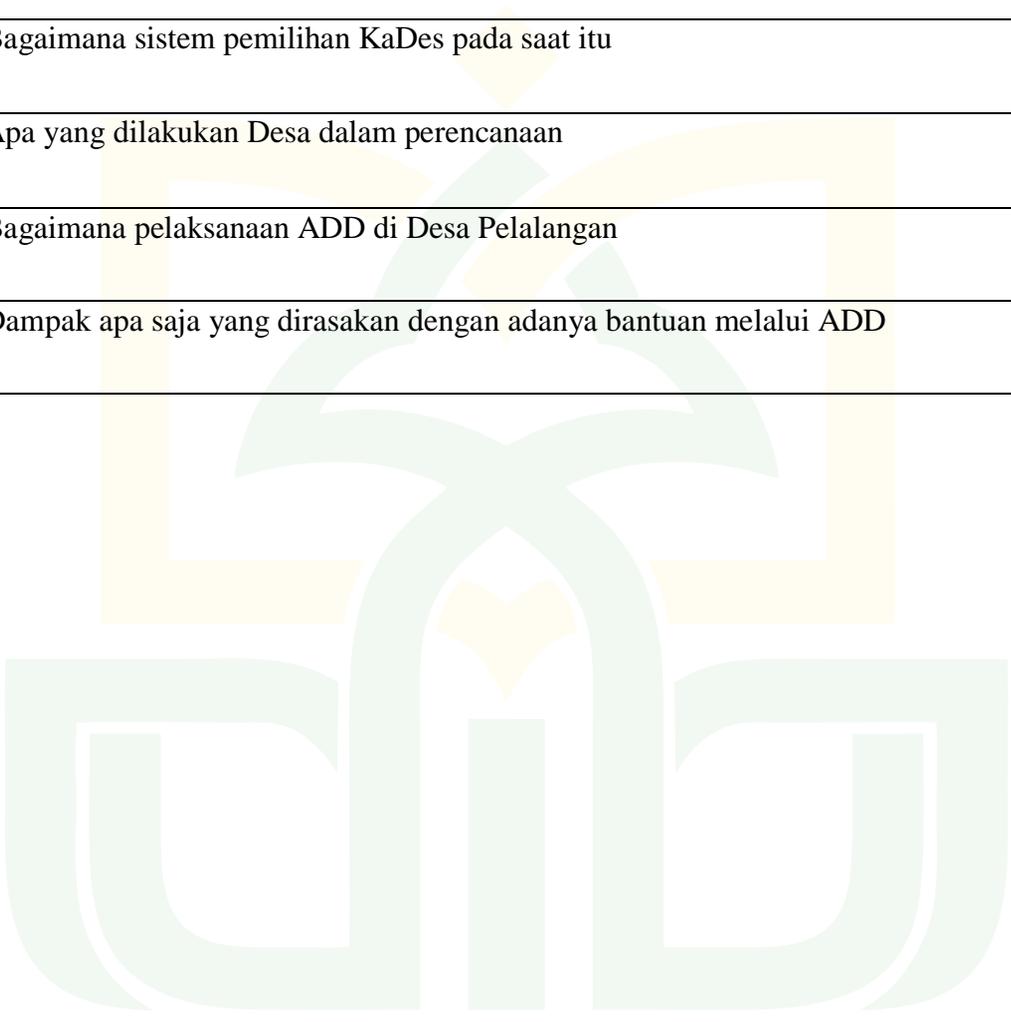


AINUL HAKKI
NIM. 083122125

Instrumen Penelitian

Nama : Ainul Hakki
NIM : 083122125
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Ekonomi Syariah

No	Daftar Pertanyaan
1	Bagaimana sejarah terbentuknya Desa Pelalangan
2	Kenapa diberi nama Pelalangan
3	Bagaimana sistem pemilihan KaDes pada saat itu
4	Apa yang dilakukan Desa dalam perencanaan
5	Bagaimana pelaksanaan ADD di Desa Pelalangan
6	Dampak apa saja yang dirasakan dengan adanya bantuan melalui ADD


IAIN JEMBER

MATRIK PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Masalah
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA PELALANGAN KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2016	1. Kesejahteraan Masyarakat	1. Kesejahteraan Masyarakat	1. Pengertian 2. Konsep Kesejahteraan	1. Informan: a. Kepala Desa b. Bagian Perangkat c. masyarakat	1. Pendekatan dan jenis penelitian ini berbentuk kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi	1. Bagaimana Perencanaan Tata Kelola (ADD) dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Pelalangan Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso?
	2. Alokasi Dana Desa	2. Alokasi Dana Desa	1. Pengertian 2. Sistem Pelaksanaan 3. Tujuan ADD 4. Sumber Pendapatan ADD	2. Dokumentasi	2. Lokasi penelitian Desa Pelalangan Kec. Wonosari Kab. Bondowoso. 3. Subyek penelitian menggunakan teknik Purposive	2. Bagaimana Pelaksanaan (ADD) dalam upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Pelalangan Tahun 2016?
	3. Ekonomi Islam	3. Landasan Ekonomi Islam	1. Pengertian Ekonomi Islam 2. Landasan Tauhid, Syariah, Akhlak 3. Prinsip Ekonomi Islam	3. Kepustakaan	4. Teknik pengumpulan data: a. Observasi b. Interview c. Dokumenter 5. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif 6. Keabsahan data menggunakan metode triangulasi sumber	3. Bagaimana Dampak Pengelolaan (ADD) terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Pelalangan Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso? 4. Bagaimana Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pelalangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso Perspektif Ekonomi Islam?



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jl. Mataram No. 1 mangli, Telp. : (0331) 487550, 427005, Fax. (0331) 427005, Kode Pos : 68136
 Website : WWW.in-jember.ac.nid – e-mail : info@iain-jember.ac.id
J E M B E R

Nomor : B- 948/In.20/7.a/PP.00.9/09/2017
 Lampiran : -
 Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.

Bapak/Ibu/Sdr : Kepala Desa Pedalangan

di-

TEMPAT

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Diberitahukan dengan hormat, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin penelitian dengan identitas sebagai berikut :

Nama Mahasiswa : Aieul Haeki
 NIM : 083122123
 Semester : II (cabang)
 Jurusan : Ekonomi Islam
 Prodi : Ekonomi Syariah
 No Telpon : 082-290406970
 Dosen Pembimbing : Martoyo S.H. M.H
 NIP : 197812122009101001
 Judul Penelitian : pengelolaan ARO dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa pedalangan kec. wanasari. kab. Blora 2016

Demikian Surat Permohonan izin penelitian ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Jember, 27 Februari 2017
 Wakti
 Wakil Dekan Bidang Akademik


 Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I
 NIP. 19730830 199903 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
KECAMATAN WONOSARI
DESA PELALANGAN**

Jln. Sukosari No.12 Kode Pos 68282

em@il: dspelalangan@gmail.com wibsite http://www.pelalangan.desa.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 470/948 /430.12.09.12/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUFID
Jabatan : Kepala Desa Pelalangan

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : AINUL HAKKI
Tempat, Tgl. Lahir : Bondowoso, 20 April 1994
NIK : 3511092004940002
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa/ Pelajar
Alamat : RT. 01 RW. 01 Desa Pelalangan Kecamatan Wonosari

Identitas tersebut adalah Mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dan pada saat ini yang bersangkutan benar-benar telah melaksanakan penelitian terkait dengan Tugas Akhir Skripsi sesuai dengan Surat Permohonan Ijin Penelitian dari Sekolah Tinggi yang bersangkutan dengan Nomor : B.948/In.20/7.a/PP.00.9/2017 tertanggal : _____ 2017.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pelalangan, 01 September 2017
Kepala Desa Pelalangan


MUFID